



LMCK TW II 2023

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA



DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



KATA PENGANTAR

Tujuan utama dari perencanaan yang baik adalah rendahnya tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh aktifitas transportasi dan angkutan jalan. Berbagai permasalahan yang muncul dalam aktifitas transportasi dan angkutan jalan diakibatkan oleh berbagai sektor, yang meliputi Manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan atau mungkin sistem yang belum mendukung.

Untuk itu Direktorat Sarana Transportasi Jalan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan keselamatan transportasi jalan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan lebih difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia di bidang keselamatan transportasi dan angkutan jalan, peningkatan kepedulian masyarakat dalam hal keselamatan transportasi dan angkutan jalan, berbagai monitoring yang berkaitan dengan kualitas sarana dan prasarana transportasi dan angkutan jalan.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 ini merupakan salah satu tanggungjawab dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan dalam hal transparansi baik finansial atau nonfinansial. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan di laporkan secara rinci. Sehingga dengan adanya laporan LMCK Tw II Tahun 2023 ini akan diketahui sejauh mana penanganan kinerja bidang sarana dan keselamatan transportasi dan angkutan jalan yang telah dilakukan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Tentu kami tidak bekerja sendiri dalam penanganan bidang sarana dan keselamatan transportasi dan angkutan jalan, ada berbagai pihak yang turut kami sertakan baik secara langsung atau pemikirannya. Besar harapan kami bahwa laporan ini akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan direktorat ini.

Terima kasih

Jakarta, 19 Juli 2023

IR. DANTO RESTYAWAN, MT
DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

2 DAFTAR ISI

3 BAB I PENDAHULUAN

4 BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

5 BAB III PENUTUP

Note : Akan disesuaikan dengan outline bagren



Bab I Pendahuluan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023
Direktorat Sarana Transportasi Jalan

LATAR BELAKANG

Direktorat Sarana Transportasi Jalan dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya .

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2023 yang merupakan tolak ukur keberhasilan maupun kurang berhasil Direktorat Sarana Transportasi Jalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama tahun anggaran 2023. Pengukuran kinerja yang berbasis pada output maupun outcome merupakan hal yang sangat penting dan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Laporan Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan menggambarkan secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2023 dikaitkan dengan upaya-upaya stratejik dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran stratejiknya dalam kerangka pemenuhan visi misi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 juga merupakan salah satu perwujudan tekad dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Direktorat Sarana Transportasi Jalan didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance, sebagai langkah tindak lanjut Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN



TUPOKSI DIT. STJ

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

TUGAS

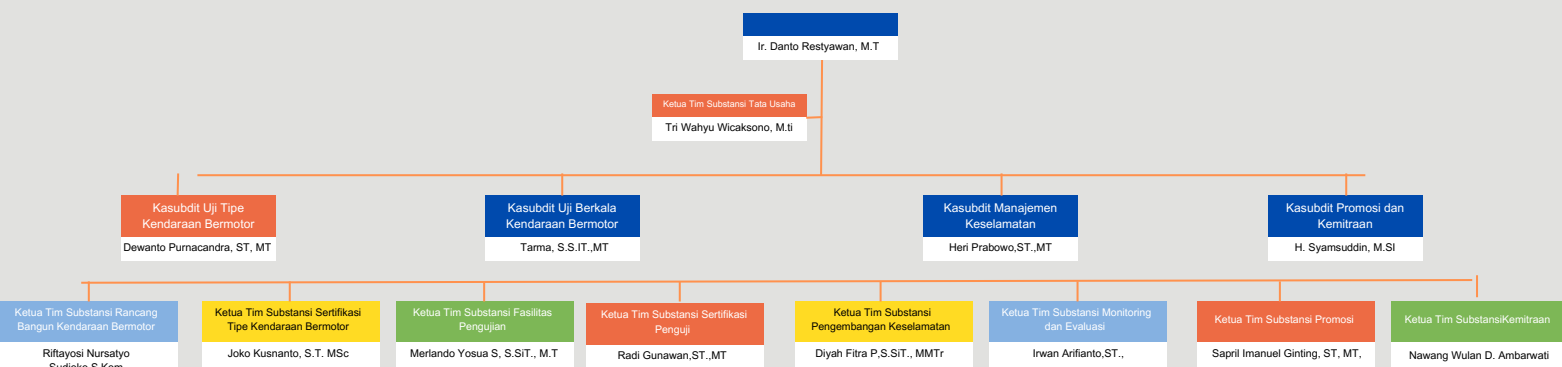
Direktorat Sarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan keselamatan transportasi jalan.

FUNGSI

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang uji tipe, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
- penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
- penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan; dan
- penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.



STRUKTUR ORGANISASI DIT. STJ



SUMBER DAYA MANUSIA

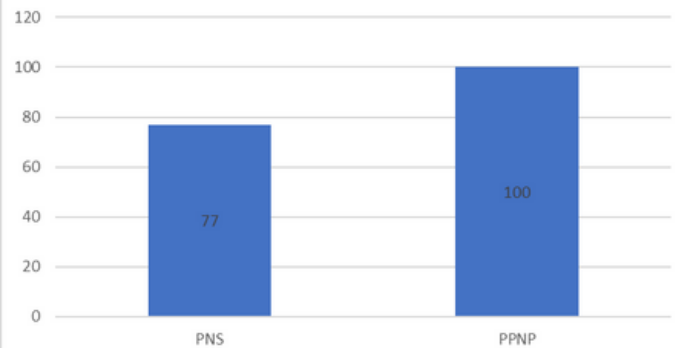


SDM Dit. STJ

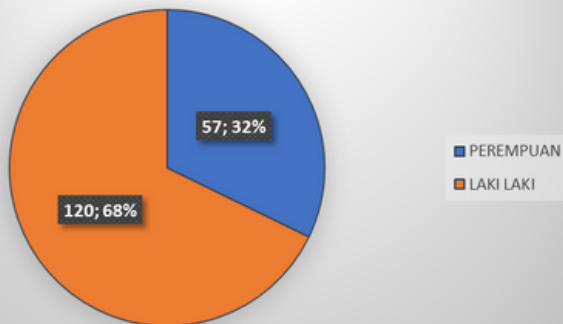
Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2022 sebanyak 176 pegawai

177
pegawai

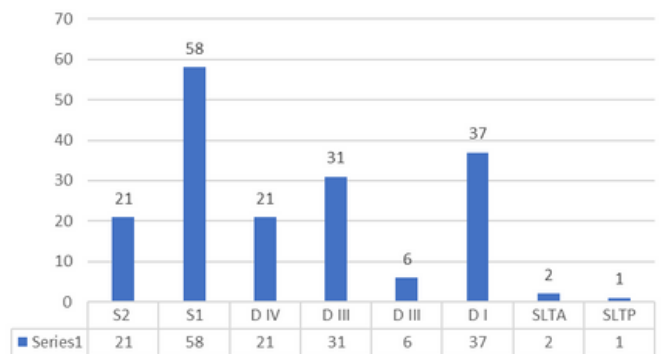
Status Pegawai



Jenis Kelamin



Tingkat Pendidikan





Isu strategis dan permasalahan di bidang sarana transportasi jalan pada tahun 2023 antara lain terkait :

- **Permasalahan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum**

Kebijakan di bidang keselamatan antara lain mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Peraturan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ini selama ini terkendala dalam hal pengesahannya. Namun pada tanggal 18 Oktober 2020 telah selesai dan disahkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagai payung hukum untuk memastikan tata kelola keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan umum sesuai standar keselamatan yang telah diatur dalam peraturan tersebut .

- **Over Dimensi dan Over Loading (ODOL)**

Permasalahan angkutan Overdimension & Overload (ODOL) di Indonesia terus-terusan berlanjut dan masih belum bisa dituntaskan. Truk ODOL logistik dan distribusi bahan baku maupun produk industri nasional sangat bergantung pada moda transportasi darat (truk). Karena moda transportasi lainnya seperti kereta api, angkutan laut dan udara belum mampu mengurangi beban dan transportasi darat.

Untuk mengendalikan angkutan barang muatan lebih atau overloading pemerintah memperkuat penyelenggaraan Unit Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk penanganan over dimensi.

Ketidak sesuaian kendaraan angkutan dengan kelas jalan yang ada juga akan menimbulkan beberapa potensi masalah diantaranya adalah :

- Potensi mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas
 - Potensi pelanggaran Dari segi daya angkut, dimensi, tata cara muat serta kelengkapan surat- surat kendaraan dan pengemudi
 - Potensi menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana jalan
- **Perkembangan Kendaraan Bermotor Listrik**
- Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca adalah melalui percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) untuk transportasi jalan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tersebut selain melalui produksi kendaraan baru, juga dilakukan melalui program konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai.



Saat ini (per 31 Maret 2023), jumlah sepeda motor yang telah dikonversi dan mendapatkan SRUT konversi sebanyak 162 unit serta telah ada 22 bengkel konversi sepeda motor tersertifikasi.

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Vehicle Type Approval (VTA) Online, jumlah kendaraan listrik yang tersertifikasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (data terlampir).

Jumlah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang telah mendapat SRUT : 2019 : 1065 unit

2020 : 2457 unit

2021 : 11989 unit

2022 : 25862 unit

2023 (per 31 maret) : 15245 unit

Permasalahan SDM Penguji Kendaraan Bermotor antara lain :

1. Di beberapa daerah masih banyak kompetensi penguji yang belum sesuai dengan jenis KBWU yang harus dilayani. Karena itu perlu percepatan untuk meningkatkan kompetensi penguji yang ada melalui Diklat atau Uji Kompetensi Naik Jenjang serta perekrutan tenaga penguji baru namun yang berasal dari lulusan D3 Penguji Kendaraan Bermotor.
2. Perlu peningkatan jenjang jabatan fungsional penguji dari jenjang jabatan fungsional keterampilan ke jenjang jabatan fungsional keahlian mengingat profesi penguji yang memiliki tanggung jawab dan resiko pekerjaan yang besar dan memiliki peranan penting dalam mewujudkan kendaraan yang berkeselamatan di jalan sehingga perlu didukung pula oleh tenaga-tenaga yang ahli bukan hanya sekedar oleh tenaga yang terampil. Selain itu dengan menjadi jabatan fungsional keahlian diharapkan dapat meningkatkan pula tunjangan jabatan bagi para penguji yang saat ini sudah tidak sesuai dan masih sangat minim dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan yang di hadapi oleh penguji.

Permasalahan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain :

1. Dari 471 UPUBKB di Indonesia, baru 343 UPUBKB yang terakreditasi dan dapat menyelenggarakan pengujian berkala secara mandiri, sehingga perlu percepatan atau peran serta dari pemerintah pusat agar dapat menghadirkan pelayanan pengujian berkala pada wilayah-wilayah yang belum terakreditasi. Salah satunya melalui mekanisme pengadaan alat uji keliling non statis yang diberikan kepada BPTD yang wilayah kabupaten/kota belum memiliki UPUBKB yang terakreditasi
2. Masih adanya kasus pungutan liar yang terjadi di daerah oleh petugas atau oknum penyelenggara pengujian berkala sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap pimpinan UPUBKB serta mendorong peningkatan pelayanan pembayaran retribusi secara non tunai (cashless).
3. Dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2022 dimana retribusi pengujian sudah tidak tercantum di dalam UU tersebut maka perlu segera menyiapkan langkah-langkah yang mendukung kebijakan tersebut agar pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang sudah ada di Indonesia tidak terganggu dalam pengoperasiannya yang tentunya walaupun dengan tidak adanya retribusi namun UPUBKB harus tetap dapat beroperasi/berjalan secara optimal untuk memberikan pelayanan pengujian berkala kepada masyarakat.





Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar isi Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

- Latar Belakang
- Tugas Pokok dan Fungsi
- Bagan Struktur Organisasi
- Sumber Daya Manusia
- Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- Sistematika Laporan
- Uraian singkat Perencanaan Strategis
- Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Bab II Akuntabilitas Kinerja

- Tahapan Pengukuran Kinerja
- Pengukuran Capaian Kinerja

SP3 Sasaran Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi

IKP3 Rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan (AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan) per 10.000 keberangkatan

- Definisi Indikator
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

IKK03 Jumlah perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)

- Definisi Indikator
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

IKK04 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan di jalan nasional

- Definisi Indikator
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

IKK05 Jumlah ketersediaan taman edukatif

- Definisi Indikator
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

IKK06 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

- Definisi Indikator
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

IKK07 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)

- Definisi Indikator
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

IKK08 Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

- Definisi Indikator
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

IKK09 Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan

- Definisi Indikator
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

IKK10 Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan

- Definisi Indikator
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

IKK11 Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor

- Definisi Indikator
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

IKK12 Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan

- Definisi Indikator
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

IKK1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

- Definisi Indikator
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

SP02 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

IKP 01 Indeks RB Kementerian Perhubungan

- Definisi Indikator
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- Realisasi Anggaran
 - Alokasi Anggaran Tahun 2023
 - Pagu Anggaran
 - Refocusing Anggaran Tahun 2023
 - Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2021 – 2023
 - Realisasi Anggaran Tahun 2023
 - Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja
 - Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - Hambatan dan Kendala

Bab III Penutup

- Penutup
- Ringkasan Capaian
- Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

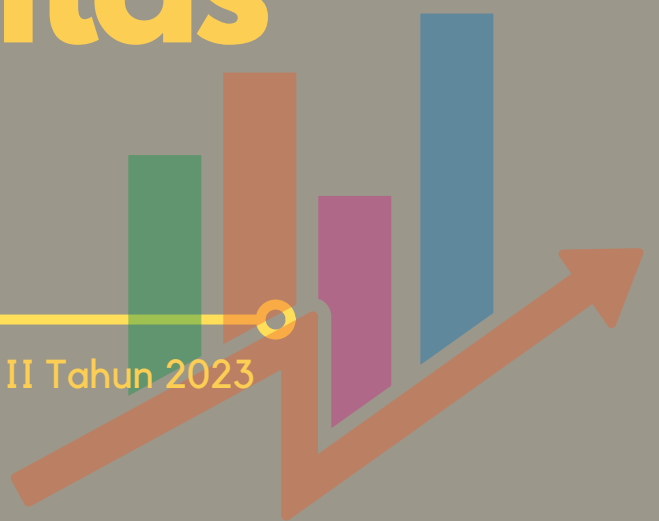
Lampiran

- Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
- Rencana Aksi Tahun 2023;
- Monitoring Rencana Aksi Tahun 2023;
- Laporan Kegiatan Instansi Pemerintah Tahun 2022;
- Draft Laporan Kegiatan Instansi Pemerintah Tahun 2022;
- Lain - lain yang dianggap perlu.



Bab II Akuntabilitas Kinerja

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023
Direktorat Sarana Transportasi Jalan



Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target Kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Tabel II.1 Rencana Kinerja Tahunan 2023

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1.	SP3 Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	IKP1 Rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan (AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan) per 10.000 keberangkatan	Persen	0,015
		IKK03 Jumlah perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)	Perusahaan	100
		IKK04 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan di jalan nasional	Lokasi	313
		IKK05 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK06 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	20.000
2.	SK4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	IKK07 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	0
		IKK08 Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	66
		IKK09 Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Dokumen	10
		IKK10 Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Draf	8
		IKK11 Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor	Sertifikat	124
		IKK12 Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jala	Orang	1.287
3.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
4	SP02 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP01 Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	88

URAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Sarana Transportasi Jalan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2021 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Sarana Transportasi Jalan melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 181,567,238,000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023 Direktorat Sarana Transportasi Jalan (Awal)

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	1. Rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan (AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan) per 10.000 keberangkatan	Persen	0,015
2.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	2. Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan	Perusahaan	100
		3. Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional	Lokasi	313
		4. Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	20.000
		5. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	66
		6. Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Dokumen	10
		7. Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Draf	8
		8. Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor	Sertifikat	124
		9. Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1.287
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	10. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	87
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	11. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	88

TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauhmana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.

Mekanisme pengelolaan kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan melalui aplikasi E-performance dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi E-Performance yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan.

Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja prosentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Prosentase Capaian Indikator
Kinerja Kegiatan

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Prosentase Capaian Indikator
sasaran Kegiatan

$$= \frac{\text{Total jumlah realisasi IK dalam Sasaran a}}{\text{Total jumlah rencana/target IK dalam Sasaran a}} \times 100 \%$$

Rata-rata nilai capaian seluruh
IK yang dilaksanakan

$$= \frac{\text{Total jumlah realisasi IK}}{\text{Total jumlah rencana/target IK}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2023 hasil pengukuran kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja yang berdasarkan pendekatan capaian kinerja dan realisasi anggaran. Dan bertujuan untuk mewujudkan empat sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maupun Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2023.

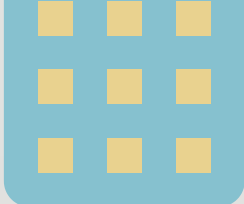
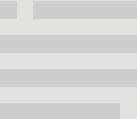
Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target kinerja dengan capaian Kinerja samapi dengan bulan September 2023 Direktorat Sarana Transportasi Jalan maka di peroleh data capaian kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan adalah pada table berikut :

Tabel II.2 Pengukuran Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2023 Triwulan II

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	TW I			TW II		
					T	R	C	T	R	C
1.	SP3	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi			200,0%			200,0%		
		Rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan (AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan) per 10.000 keberangkatan	Persen	0,015	0,015	0	200,0%	0,015	0	200,0%
2.	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat			47,5%			71,8%		
		Jumlah perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)	Perusahaan	100	100	96	96,0%	100	108	108,0%
		Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan di jalan nasional	Lokasi	313	313	283	77,2%	313	303	96,8%
		Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	20.000	20.000	0	0,0%	20.000	21.578	107,9%
		Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	0	-	-	-	-	-	-
		Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	66	66	66,02	100,03%	66	67,96	103,0%
		Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Dokumen	10	10	0	0,0%	10	0	0,0%
		Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Draf	8	8	0	0,0%	8	0	0,0%
		Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor	Sertifikat	124	124	0	88,6%	124	0	88,6%
		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1.287	1.287	906	70,4%	1.287	906	70,4%
3.	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat			100,0%			100,0%		
		Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88	88	88	100,0%	88	88	100,0%
4	SP2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			100,0%			100,0%		
		IKP 01 Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	87	87	87	100,0%	87	87	100,0%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Program					111,9%			118,0%		
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Program					73,2%			88,6%		

Selama tahun 2023 Triwulan II, ada 4 Sasaran Kegiatan yang dimiliki oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan yaitu :

- 1.SP3 - Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
- 2.SK4 - Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat
- 3.SK5 - Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat
- 4.SP02- Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik





SP3

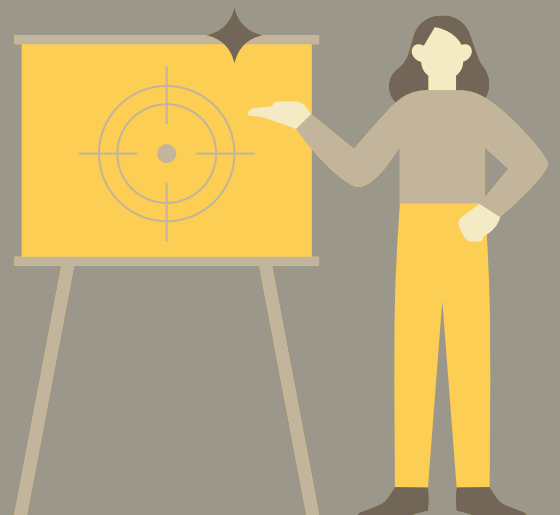
Sasaran Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Direktorat Sarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam peningkatan keselamatan transportasi darat. Direktorat Sarana Transportasi Jalan mempunyai kontribusi dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang merupakan sasaran program di Unit Eselon I dan Kementerian Perhubungan. Adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA

IKP1

**Rasio Kejadian Kecelakaan
Transportasi Jalan per
10.000 Keberangkatan**



IKP01

Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan

REALISASI 2023

0

CAPAIAN KINERJA

200,00%

Rasio kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan merupakan jumlah kecelakaan pada tahun (n) per 10.000 keberangkatan angkutan umum di jalan yang dilakukan investigasi oleh KNKT. Adapun angkutan umum di jalan terdiri dari layanan Angkutan Antarakota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Perintis di Jalan yang disubsidi APBN.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 03 Meningkatnya Keselamatan Transportasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada IKP 01 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Per 10.000 Keberangkatan dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM				
SP03	Meningkatnya Keselamatan Transportasi			
IKP01	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Satuan :	Ratio	
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2	Y2023
Target		0,015	0,015	0,015
Realisasi		0,00	0,00	0,00
Capaian		200,00%	200,00%	200,00%

Sumber: Data Kecelakaan Bus AKAP dan Bus Perintis (KNKT), Data Keberangkatan Bus AKAP (Dit. Prasarana Transportasi Jalan), Data ritase Bus Perintis (Dit. Angkutan Jalan), dioalah kembali oleh Dit. Sarana Transportasi Jalan

Rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan merupakan jumlah kecelakaan pada tahun (n) per 10.000 keberangkatan angkutan umum di jalan. Adapun angkutan umum di jalan terdiri dari layanan Angkutan Antara Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Perintis di Jalan yang disubsidi APBN. Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan digunakan rumus sebagai berikut:

Rumus Realisasi IKP01

Realisasi IKP1

$$= \frac{\text{Jumlah Kecelakaan yang melibatkan AKAP dan / atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah keberangkatan perjalanan AKAP dan / atau Angkiuatn Perintis di Jalan pada Tahun (n)}} \times 10.000 \text{ Keberangkatan}$$

Keterangan :

Jumlah kecelakaan yang melibatkan AKAP dan/atau Angkutan Perintis di Jalan pada tahun (n), dimana (n) merupakan periode pada tahun berjalan yaitu tahun 2023.

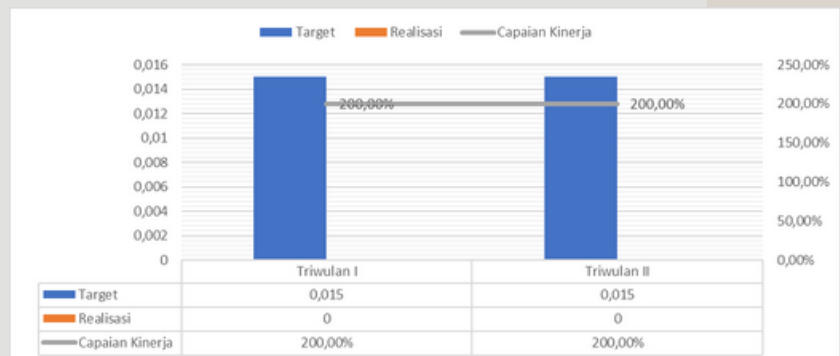
- o Data kecelakaan yang melibatkan AKAP dan/atau Angkutan Perintis diperoleh dari koordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Kementerian Perhubungan;
- o Data kecelakaan yang melibatkan AKAP dan/atau Angkutan Perintis yang digunakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi adalah:
 - Data kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan korban paling sedikit 8 (delapan) orang;
 - Mengundang perhatian publik secara luas;
 - Menimbulkan polemik/kontroversi;
 - Menimbulkan prasarana rusak berat
 - Berulang-ulang pada merek dan/atau tipe kendaraan yang sama dalam satu tahun
 - Berulang-ulang pada lokasi yang sama dalam satu tahun.
- o Data kecelakaan tersebut merupakan data yang didapatkan melalui pencatatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Kementerian Perhubungan.

Jumlah keberangkatan perjalanan AKAP dan/atau Angkutan Perintis di Jalan pada tahun (n), dimana (n) merupakan periode pada tahun berjalan yaitu tahun 2023.

- o Data keberangkatan (ritase) angkutan umum di jalan didapatkan melalui data realisasi keberangkatan AKAP di terminal dan data realisasi penyelenggaraan subsidi keberintisan angkutan jalan pada tahun (n) .
 - Data realisasi keberangkatan AKAP diperoleh dari Aplikasi SIASATI yang dapat diakses melalui website <http://siasati.dephub.go.id>
 - data realisasi penyelenggaraan subsidi keberintisan angkutan jalan diperoleh melalui koordinasi antara Direktorat Angkutan Jalan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dan Perum DAMRI.

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Dit. Sarana TJ Tahun 2023

Realisasi Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2023 sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar 0,015 maka capaian kinerja mencapai 200,00% Pencapaian ini digambarkan pada grafik berikut :



Sumber: Data Kecelakaan Bus AKAP dan Bus Perintis (KNKT), Data Keberangkatan Bus AKAP (Dit. Prasarana Transportasi Jalan), Data ritase Bus Perintis (Dit. Angkutan Jalan), dioalah kembali oleh Dit. Sarana Transportasi Jalan

Analisa Keberhasilan / Kegagalan

Dasar Hukum

Dalam rangka mencapai keberhasilan Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 keberangkatan Direktorat Sarana Transportasi Jalan mengacu pada aturan :

- Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- PP 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan;
- PP 62 tahun 2013 Tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
- PP 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Perpres Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) LLAJ;
- PM 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

Kronologi Target

Pada tahun 2023, target Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2023 ditargetkan 0,015 yang diperoleh dari angka capaian realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 0,015 dan merupakan target yang disampaikan oleh Pimpinan.

Pada periode sampai dengan Tahun 2023, berdasarkan data yang dihimpun dari website Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) <http://knkt.dephub.go.id/>, kecelakaan yang melibatkan kendaraan bus AKAP dan bus Perintis dengan ketentuan kecelakaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi dijelaskan bahwa kecelakaan kendaraan umum yaitu meliputi terdapat adanya korban jiwa paling sedikit 8 (delapan) orang, mengundang perhatian publik secara luas sehingga adanya laporan dari masyarakat, menimbulkan polemik/kontroversi, menimbulkan prasarana yang rusak berat, terjadi berulang-ulang pada merek dan/atau tipe kendaraan yang sama dalam 1 (satu) tahun, berulang-ulang pada lokasi yang sama dalam satu tahun yang sama. Didapatkan hasil realisasi rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan adalah sebanyak **0 (nol) kejadian kecelakaan**. Jumlah kejadian kecelakaan tersebut merupakan banyaknya kecelakaan angkutan umum di jalan yang hanya melibatkan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Perintis yang disubsidi oleh APBN perhitungan kejadian kecelakaan berikut tidak termasuk Angkutan Pariwisata dan Angkutan Barang.

**Jumlah Investigasi
Kecelakaan oleh
KNKT sampai
dengan Juni 2023**

0

**Kejadian
kecelakaan**

Sedangkan, jumlah keberangkatan bus di Terminal Penumpang Tipe A dan Jumlah Keberangkatan angkutan keperintisan pada periode Januari sampai dengan Juni Tahun 2023 **sebanyak 1.390.012 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Belas)** keberangkatan dengan rincian:

- Jumlah keberangkatan **Bus AKAP** periode Januari – Juni 2023 sebanyak **1.330.185 (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima)** keberangkatan, dan
- Jumlah keberangkatan **Bus Perintis** periode Januari – Juni 2023 sebanyak **59.827 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh)** keberangkatan.

Jumlah Keberangkatan Bus AKAP dan Bus Perintis sampai dengan Juni 2023



1.390.012

**1.330.185 Bus AKAP
59.827 Bus Perintis**

No	Jenis Angkutan Umum	Jumlah Keberangkatan (Kumulatif)	
		Triwulan II	
1	Bus AKAP		1.330.185
2	Bus Perintis		59.827
Total			1.390.012

Sumber: Data Bus Perintis (KNKT), Data Keberangkatan Bus AKAP (Dit. Prasarana Transportasi Jalan), Data ritase Bus Perintis (Dit. Angkutan Jalan), diaolah kembali oleh Dit. Sarana Transportasi Jalan

Perhitungan Realisasi IKP01

Realisasi IKP1 = $\frac{\text{Jumlah Kecelakaan yang melibatkan AKAP dan atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah keberangkatan perjalanan AKAP dan atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)}} \times 10.000 \text{ Keberangkatan}$

$$IKP 1 = \frac{0}{1.390.012} \times 10.000 = 0,00$$

Berdasarkan perhitungan realisasi indikator kinerja program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan Triwulan II tahun 2023, didapatkan hasil realisasi rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan adalah 0,00. Jumlah perhitungan kecelakaan tersebut merupakan banyaknya kecelakaan sesuai dengan PP 62 Tahun 2018 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi yaitu terdapat korban jiwa paling sedikit 8 (delapan) orang, mengundang perhatian publik secara luas, menimbulkan polemik/kontroversi, menimbulkan prasarana rusak berat, berulang-ulang pada merek dan/atau tipe kendaraan yang sama dalam satu tahun, berulang-ulang pada lokasi yang sama dalam satu tahun.

Faktor Keberhasilan Kinerja

Sampai dengan bulan Juni tahun 2023, Direktorat Sarana Transportasi Jalan berhasil mencapai target Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan karena faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adanya pelaksanaan Pembinaan Teknis Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum di seluruh Indonesia dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Keselamatan di Perusahaan Angkutan Umum;
2. Pelaksanaan Monitoring Keselamatan Transportasi Jalan;
3. Pelaksanaan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum AKAP maupun Angkutan Barang;
4. Regulasi di bidang keselamatan transportasi jalan yang sudah mengalami peningkatan kepatuhan;
5. Peningkatan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan angkutan umum di daerah melalui Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB);
6. Adanya Sosialisasi keselamatan jalan yang dilakukan melalui berbagai media;
7. Pelaksanaan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan Pariwisata dan AKAP, dalam rangka menurunkan angka kecelakaan pada AKAP dan pariwisata yang dilaksanakan di Jawa Barat;
8. Pelaksanaan Ramp Check Angkutan Umum;
9. Pelaksanaan Pembinaan Teknis Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor;
10. Pelaksanaan Monitoring SRUT.

Faktor Kendala Kinerja

Beberapa faktor kendala yang menghambat pencapaian Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan pada Triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan angkutan umum yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) masih sangat sedikit, sampai Juni tahun 2023 sebanyak 108 perusahaan yang memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dari 4.848 Perusahaan Angkutan Umum (PAU) per tanggal 30 Juni 2023;
2. Belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum;
3. Belum satu tujuannya perusahaan angkutan umum dengan pemerintah akan pentingnya keselamatan, keselamatan merupakan investasi sedangkan perusahaan masih beranggapan bahwa keselamatan merupakan sebuah *at cost* bagi perusahaan itu sendiri;
4. Masih belum adanya kesadaran Perusahaan Angkutan Umum akan pentingnya Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan mengurangi angka kecelakaan dan fatalitas;
5. Masih ditemukan banyaknya SRUT yang tidak diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Realisasi pencapaian kinerja semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian IKP1} = \frac{(Target\ 2023 - (Realisasi\ 2023 - Target\ 2023))}{Target\ 2023} \times 100\%$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian IKP1} = \frac{(0,015 - (0,00 - 0,015))}{0,015} \times 100\% = 200,00\%$$

Kode	Indikator	TW I			TW II		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKP01	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	0,015	0,00	200,00%	0,015	0,00	200,00%

Adapun upaya yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Per 10.000 Keberangkatan antara lain dengan dilaksanakannya monitoring dan pembinaan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum, serta didukung oleh peningkatan mutu dengan tetap menerapkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan sehingga dapat menurunkan tingkat kejadian kecelakaan pada angkutan bus AKAP dan Perintis.

Untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu salah satunya dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pada Perusahaan Angkutan Umum dan melanjutkan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk menurunkan angka kecelakaan AKAP dan bus perintis, antara lain:

Kebijakan atau regulasi

- Akan disempurnakan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan keselamatan angkutan umum;
- Akan diatur regulasi terkait dengan penyediaan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan umum;
- Akan diberikan reward kepada perusahaan angkutan umum yang sudah menerapkan SMK dan akan mendorong kepada perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya dengan melakukan asistensi atau pendampingan dalam penerapan SMK.

Sosialisasi

- Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara menyeluruh baik offline maupun online (melalui media elektronik, media sosial dll);
- Menggandeng public figure untuk mengkampanyekan keselamatan jalan sehingga meningkatkan awareness masyarakat terhadap keselamatan jalan.

Implementasi atau Penyelenggaraan

- Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat dan staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan;
- Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU.
- Melaksanakan Ramp Check Angkutan Umum;
- Melaksanakan Pembinaan Teknis Manajemen Batas Kecepatan;
- Melaksanakan Forum LLAJ Bidang Keselamatan Jalan terkait Harmonisasi RUNK LLAJ;
- Melaksanakan Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Umum;
- Melaksanakan Ketahanan Uji Guling pada Kendaraan Bus.

Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan;
- Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum AKAP/Pariwisata maupun Angkutan Barang (B3);
- Monitoring dan Evaluasi perusahaan karoseri produksi kendaraan bermotor;
- Monitoring SRUT.

Teknologi Informasi

- Untuk mempermudah pendataan dan pengawasan penerapan SMK pada perusahaan angkutan umum akan dibangun sistem informasi SMK pada perusahaan angkutan umum (e-SMK) yang nantinya akan diintegrasikan dengan sistem informasi perijinan angkutan umum (SPIONAM) sehingga pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal;
- Optimalisasi aplikasi Terminal Online Sistem (TOS) untuk pengawasan keberangkatan bus AKAP di terminal;
- Integrasi aplikasi rampcheck dengan aplikasi TOS dan SPIONAM sehingga mempermudah dalam pelaksanaan inspeksi keselamatan pada kendaraan angkutan umum.

Koordinator atas Indikator Kinerja - Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan adalah Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Ditjen Hubdat dengan dibantu oleh Direktorat Angkutan Jalan dan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Ditjen Hubdat. Adapun anggaran kegiatan terkait Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2023 yaitu senilai **Rp6.561.000.000,-** dan sampai dengan bulan Juni tahun 2023 realisasi anggaran senilai **Rp3.237.347.468,-** atau sebesar **49,34%**. Kegiatan yang mendukung tercapai Indikator Kinerja Program tersebut dalam Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:



No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Keterangan
1	Pembinaan Teknis Manajemen Batas Kecepatan	Rp370.000.000	Rp172.548.390	46,63%	
2	Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Kendaraan Bermotor	Rp380.000.000	Rp -	0,00%	
3	Pembinaan Teknis Petugas Pemeriksa BAP Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	Rp300.000.000	Rp -	0,00%	
4	Pembinaan Teknis Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor	Rp380.000.000	Rp274.409.000	72,21%	
5	Inspeksi Keselamatan Kesiapan Sarana Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru (Rampcheck)	Rp550.000.000	Rp444.646.520	80,84%	
6	Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Orang	Rp380.000.000	Rp269.610.000	70,95%	
7	Bimbingan Teknis Manajemen Kampanye Keselamatan Transportasi Jalan	Rp480.000.000	Rp336.097.160	71,51%	
8	Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rp674.000.000	Rp271.695.496	40,31%	
9	Monitoring dan Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan)	Rp340.000.000	Rp338.898.240	99,68%	
10	Program Aksi Keselamatan Berkendaraan	Rp727.000.000	Rp610.951.500	84,04%	
11	Bimbingan Teknis Keselamatan Jalan Anak Usia Sekolah	Rp500.000.000	Rp87.000.000	18,51%	
12	Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan	Rp380.000.000	Rp204.738.290	53,88%	
13	Pembinaan Teknis Penilai Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rp480.000.000	Rp47.175.000	9,83%	
14	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Promosi dan Kemitraan Keselamatan	Rp340.000.000	Rp87.009.422	25,59%	
15	Forum LLAJ Bidang Keselamatan Jalan Harmonisasi RUNK	Rp280.000.000	Rp92.568.450	33,06%	
Total		Rp. 6.561.000.000	Rp. 3.237.347.468	49,34%	

Keberhasilan/kegagalan tercapainya indikator Persentase Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan antara lain dengan dilaksanakannya rampcheck angkutan umum (AKAP), serta pelaksanaan monitoring dan pembinaan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum, serta didukung oleh peningkatan mutu dengan tetap menerapkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan sehingga dapat menurunkan tingkat kejadian kecelakaan pada AKAP, Pariwisata, dan Perintis.

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu salah satunya dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pada Perusahaan Angkutan Umum baik Angkutan Orang maupun Barang Berbahaya Beracun (B3) dan melanjutkan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk menurunkan angka kecelakaan AKAP, antara lain:

1. Kebijakan atau regulasi

- a. Akan disempurnakan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) pada perusahaan angkutan umum terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan keselamatan angkutan umum;
- b. Akan diatur regulasi terkait dengan penyediaan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan umum;
- c. Akan diberikan reward kepada perusahaan angkutan umum yang sudah menerapkan SMK dan akan mendorong kepada perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya dengan melakukan asistensi atau pendampingan dalam penerapan SMK;
- d. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan.

2. Sosialisasi

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara menyeluruh baik offline maupun online (melalui media elektronik, media sosial dll);
- b. Menggandeng public figure untuk mengkampanyekan keselamatan jalan sehingga meningkatkan awarness masyarakat terhadap keselamatan jalan;
- c. Sosialisasi terkait Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum kepada Pemerintah-pemerintah daerah.

3. Implementasi atau Penyelenggaraan

- a. Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik AKAP/Pariwisata maupun Angkutan Barang Khusus Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat, staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan dan Dinas Perhubungan Provinsi Seluruh Indonesia;
- c. Melaksanakan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan umum;
- d. Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU;
- e. Melaksanakan Ramp Check Angkutan Umum;
- f. Melaksanakan Pembinaan Teknis tentang manajemen batas kecepatan kepada perusahaan angkutan umum dan Dinas Perhubungan daerah.
- g. Melaksanakan Forum LLAJ Bidang Keselamatan Jalan yang mana merupakan harmonisasi terhadap RUNK LLAJ.

4. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan;
- b. Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum AKAP/Pariwisata maupun Angkutan Barang (B3) yang telah dinyatakan lulus Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

5. Teknologi Informasi

- a. Untuk mempermudah pendataan dan pengawasan penerapan SMK pada perusahaan angkutan umum akan dibangun sistem informasi SMK pada perusahaan angkutan umum Elektronik Sistem Manajemen Keselamatan (e-SMK) yang nantinya akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Perizinan Online Angkutan dan Multimoda (SPIONAM) sehingga pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal;
- b. Optimalisasi aplikasi Terminal Online Sistem (TOS) untuk pengawasan keberangkatan bus AKAP di terminal;
- c. Integrasi aplikasi ramcheck dengan aplikasi TOS dan SPIONAM sehingga mempermudah dalam pelaksanaan inspeksi keselamatan pada kendaraan angkutan umum.



SK4

Sasaran Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Direktorat Sarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam peningkatan keselamatan transportasi darat. Direktorat Sarana Transportasi Jalan mempunyai kontribusi dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat. Adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) **(IKK03)**
2. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan di jalan nasional **(IKK04)**
3. Jumlah ketersediaan taman edukatif **(IKK05)**
4. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan **(IKK06)**
5. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE) **(IKK07)**
6. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor **(IKK08)**
7. Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan **(IKK09)**
8. Jumlah Draft Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan **(IKK10)**
9. Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor **(IKK11)**
10. Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan **(IKK12)**



IKK03

Jumlah perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)

Sistem Manajemen Keselamatan angkutan umum adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat, Direktorat Sarana Transportasi Jalan pada IKK03 Jumlah perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK), dapat dilihat pada tabel di bawah ini

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM				
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat			
IKK 3	Jumlah Perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan SMK	Satuan :	Perusahaan	
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2	Y2023
Target		100	100	100
Realisasi		96	108	108
Capaian		96,00%	108,00%	108,00%

Sumber: Data Rekapitulasi Dit. Sarana Transportasi Jalan

Untuk menghitung capaian indikator Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan digunakan rumus sebagai berikut:

Capaian IKK03 = Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang menerapkan SMK sampai dengan tahun (n), dimana (n) merupakan periode tahun berjalan yaitu tahun 2023

Jumlah Perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) sampai dengan Juni 2023 sebanyak 108 Perusahaan maka realisasi IKK03 pada TW II adalah sebagai berikut:

REALISASI IKK03 TW II = 108



40

Perusahaan Angkutan Orang

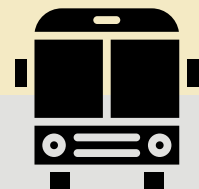


68

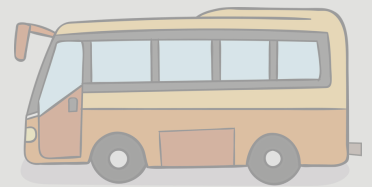
Perusahaan Angkutan Barang

108 PERUSAHAAN

1. PT. BIMA SUCI JAYA AGUNG
2. PT. DEWI PUTRI NASIMA
3. PT. EKA MIRA PRIMA SENTOSA
4. PT. GUNUNG HARTA TRANSPORT SOLUTIONS
5. PT. HARYANTO MOTOR INDONESIA
6. PT. HIBA UTAMA
7. PT. HS BUDIMAN 45
8. PT. KRAKATAU ARGO LOGISTICS
9. PT. LANGSUNG LANCAR CEMERLANG
10. PT. SAHABAT KITA SEJATI
11. PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU
12. PT. SINAR JAYA MEGAH LANGGENG
13. PT. SINAR MAS TRANSPORT
14. PT. TEGUH MUDA ABADI
15. PT. INDO TRANSPORT ABDIMAS
16. PT. MANUPPAK ABADI
17. PT. INDOSTAR CARGO
18. PT. SETIA NEGARA
19. PT. HIDUP BARU PUTRA
20. PERUM DAMRI
21. PT. GILANG SEMBILAN SEMBILAN
22. PT. ELNUSA PETROFIN
23. PT. PRASADHA PEMUNAH LIMBAH INDUSTRI
24. PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA
25. PT. SINAR JAYA LANGGENG UTAMA
26. PT. HANOMAN SAKTI PRATAMA
27. PT. MURNI ANUGRAH JAYA USAHA
28. PT. ASLI PRIMA INTI KARYA
29. PT. GARUDA MAS PUTERA ESA
30. PT. SUMBER WARAS PUTRA
31. PT. LADJU SRIKANDI MANDIRI
32. PT. PUNINAR FUELLER
33. PT. DAKOTA LOGISTIK INDONESIA
34. PT. EFISIENSI PUTERA UTAMA
35. PT. SUMA ADI JAYA
36. PT. DINAMIKA MAKMUR SENTOSA
37. PT. PUNINAR JAYA
38. PT. GONDO INTI PERSADA
39. PT. LADJU SENTOSA MANDIRI
40. PT. PROLINK
41. PT. NUSATAMA INDOTAINER
42. PT. PRIMAJASA PERDANA RAYA UTAMA
43. PT. LOOKMAN DJAJA
44. PT. MULTIPRIMA USAHATAMA
45. PT. AUDRI LUTFIA JAYA
46. PT. BATUTA EKSPEDISI LOGISTIK
47. PT. CIPTA KRIDA BAHARI
48. PT. BUANA CENTRA SWAKARSA
49. PT. KALISARI CITRA JAYA
50. PT. EWAY ALLIANCE INDONESIA
51. PT. ARTAMA SENTOSA INDONESIA
52. PT. LINTAS BUANA KASEI
53. PT. MEGA SAMUDRA TAMA
54. PT. SCG BARITO LOGISTIC
55. PT. CITRA TRANSPORT LOGISTIC
56. PT. MAJU ASRI JAYA UTAMA
57. PT. BERKAT JAYA SUKSES
58. PT. UNITED AUTO MOBIL SEMBILAN PULUH UTAMA
59. PT. SUMBER ALAM EXPRESS
60. PT. HAZMAT TECHNO INDONESIA
61. PT. TECH LOGISTIK INDONESIA
62. PT. INSPIRED SINAR ABADI
63. PT. PETROKOPINDO CIPTA SELARAS
64. PT. INDOWASTEK
65. PT. RIZKY PUTRA 168
66. PT. TRANSWASTE MODA INDONESIA
67. PT. KITA MANDIRI ABADI
68. PT. TRIATRA MULIA INDONESIA
69. PT. WASTEC INTERNASIONAL
70. PT. SAN PUTRA SEJAHTERA
71. PT. GLOBAL BORNEO TRANSPORT
72. PT. GALATAMA NUANSA TOUR
73. PT. NANDA PERSADA TRANSPORT
74. PT. NANDA PERSADA SENTOSA
75. PT. TARUNA MITRA NUSANTARA
76. PT. LINTAS HARAPAN MANDIRI
77. PT. JAYA JAGAT RAYA
78. PT. KARYA SETIAWAN EKATAMA
79. PT. SUMBER ANUGRAH ENERGY
80. PT. ANUGERAH RESKI UTAMA ZANGATTA
81. PT. DOHOT ALAM SEJAHTERA
82. PT. SARANA PUTRA DAERAH
83. PT. JACKAL HOLIDAYS
84. PT. BIMA INTI GLOBAL
85. PT. ARIMBI JAYA AGUNG
86. PT. PETRO UTAMA ENERGI
87. PT. RUSLI JAGAT UTAMA
88. PT. JASA MEDIVEST
89. PT. DUNIA EXPRESS TRASINDO
90. PT. PETROLIN NIAGA ENERGI
91. PT. SINAR ANUGERAH BATTERY
92. PT. ARK LOGISTICS & TRANSPORT
93. PT. SUMBER ADI MULYO TULUNGAGUNG
94. PT. SUNGAI BUDI
95. PT. TRANS DARPI INDONESIA
96. PT. DAME ALAM SEJAHTERA
97. PT. MEGA TRANS ENERGI
98. PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI
99. PT. TRANSINDO PERKASA PRIMA
100. PT. ISKANDAR SARI ANDALAS
101. PT. ANDALAN NUSA PRATAMA
102. PT. JABAR LAJU TRANSINDO
103. PT. PUTRA DAERAH MANDIRI JAYA
104. PT. ANAK LANANG TIGA PERKASA
105. PT. CLP INDONESIA
106. PT. RYANTA MITRA KARINA
107. PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT
108. PT. SURYA PURNAMA SEMESTA



Perbandingan Realisasi TW II dan Target Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana TJ Tahun 2023



Perbandingan Realisasi dan Target Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2023 Realisasi Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan tahun 2023 pada periode TW II adalah sebanyak 108 **perusahaan angkutan umum** yang telah menerapkan SMK pada perusahaannya. Jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebanyak **108 perusahaan** maka capaian kinerja mencapai **108,00%** Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK03 Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan tahun 2023

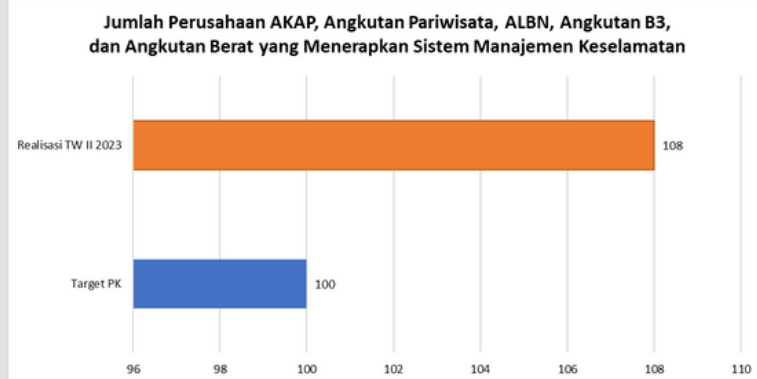
Analisa Keberhasilan / Kegagalan

Dasar Hukum

Dalam rangka mencapai keberhasilan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Direktorat Sarana Transportasi Jalan mengacu pada aturan :

1. PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ
2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang RUNK LLAJ
3. PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
4. KP.1990/AJ.503/DRJD/2019 tentang Tata Cara Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
5. KP-DRJD 1913 Tahun 2021 tentang Kompetensi Penilai SMK PAU

Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan tahun 2023 adalah sebanyak **108 perusahaan** angkutan umum yang telah menerapkan SMK yang terdiri dari 40 perusahaan angkutan orang dan 68 perusahaan angkutan barang. Data ini didapatkan dari hasil penilaian dokumen SMK oleh



Direktorat Sarana Transportasi Jalan kepada 126 perusahaan angkutan umum yang mengajukan dokumen SMK untuk dinilai, dari perusahaan tersebut yang telah lulus dengan nilai "Sangat Baik" sebanyak 108 perusahaan. Terdapat sebanyak 18 perusahaan yang sedang menjalani proses penilaian dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

Saat ini Direktorat Sarana Transportasi Jalan, melalui Subdit Manajemen Keselamatan terus berupaya dan mendorong perusahaan angkutan umum untuk menyusun dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan sebagai komitmen mewujudkan keselamatan dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Perusahaan AU yg Menerapkan SMK s.d tahun (n)}}{\text{Target tahun (n)}} \times 100\%$$

tahun (n) = Tahun berjalan yaitu 2023

$$\% \text{ Capaian} = (108/100) \times 100\% = 108,00\%$$

Capaian Kinerja TW II
terhadap Target
Kinerja

108,00%

Kode	Indikator	TW I			TW II		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKK03	Jumlah Perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan SMK	100	96	96,0%	100	108	108,00%



Realisasi Indikator Kinerja Triwulan II Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan adalah sebanyak 108 perusahaan atau sebesar 108,00%.

Belum tercapainya indikator Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan tahun 2023 antara lain yaitu masih banyaknya perusahaan angkutan umum yang belum terlalu paham mengenai penyusunan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum sehingga sampai saat ini Direktorat Sarana Transportasi Jalan terus mendorong dan mensosialisasikan tata cara penyusunan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum kepada Perusahaan-perusahaan angkutan umum. faktor lain yang mempengaruhinya yaitu terdapat 10 elemen yang harus di penuhi oleh perusahaan angkutan umum untuk mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum namun masih banyak perusahaan yang masih belum bisa memenuhi 10 elemen tersebut sehingga proses penyusunan dokumen menjadi terhambat. Serta belum diterapkannya *punishment* bagi perusahaan yang belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator diatas adalah dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan)
2. Pembekalan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum
3. Memaksimalkan SDM dengan anggaran yang tersedia yaitu dengan melaksanakan monitoring secara bersamaan kepada perusahaan yang berada di wilayah yang bedekatan oleh 1 (satu) Tim.
4. Koordinasi dengan Direktorat Angkutan Jalan untuk menindaklanjuti bahwa Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum merupakan salah satu persyaratan untuk memperpanjang perijinan
5. Sosialisasi menggunakan media elektronik terkait Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Adapun anggaran terkait indikator Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Persentase
Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan)	340.000.000	340.000.000	338.898.240	99,68%
Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen SMK Perusahaan Angkutan Umum	674.000.000	674.000.000	271.695.496	40,31%
Pembinaan Teknis Penilai Dokumen SMK-PAU	480.000.000	480.000.000	47.175.000	9,83%
Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	286.000.000	286.000.000	47.157.240	16,49%
JUMLAH	1.780.000.000	1.780.000.000	704.925.976	39,60%



Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang hal-hal yang akan dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan Kegiatan Pembinaan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU) dan Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen SMK Perusahaan Angkutan Umum kepada perusahaan angkutan umum dalam Menyusun dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum, melaksanakan monitoring pembinaan keselamatan angkutan umum bagi perusahaan yang baru menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum serta juga monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan yang telah lulus Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, akan disempurnakan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) pada perusahaan angkutan umum yaitu mengenai kategorisasi perusahaan menjadi rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.

Kegiatan Pembinaan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU) bertujuan agar sumber daya manusia untuk penilai dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU) bertambah banyak sehingga penilaian dokumen SMK dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih cepat dengan sumber daya manusia yang berkompeten.

Seiring dengan bertambahnya sumber daya manusia penilai SMK Perusahaan Angkutan Umum maka Kegiatan Pembinaan Teknis penyusunan Dokumen SMK Perusahaan Angkutan Umum perlu dilaksanakan sehingga manajemen keselamatan dan pengelolaan resiko kecelakaan dalam suatu perusahaan dapat terwujud dan timbulnya kesadaran suatu perusahaan mengenai pentingnya keselamatan.

IKK04

Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan di jalan nasional

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas Keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.

Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) adalah bagian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan, serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai danau dari lokasi permukiman menuju sekolah.

Batas kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan/atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometrik jalan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat, Direktorat Sarana Transportasi Jalan pada IKK04 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan di jalan nasional, dapat dilihat pada tabel di samping ini

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM				
SK04	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat			
IKK04	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional	Satuan:	Lokasi	
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2	Y2023
Target		313	313	313
Realisasi		283	303	303
Capaian		90,42%	96,81%	96,81%

Sumber: Data BPTD diseluruh Indonesia dan diolah kembali oleh Dit. Sarana Transportasi Jalan

Indikator Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku. Pembangunan ZoSS, RASS dan implementasi batas kecepatan dilakukan oleh BPTD dan untuk pembinaan serta pengawasan dilakukan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Untuk menghitung capaian indikator Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKK04} = \frac{\text{Jumlah pembangunan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional sampai dengan tahun ke (n), dimana (n) merupakan periode tahun berjalan yaitu Tahun 2023.}}{\text{Jumlah pembangunan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional sampai dengan tahun ke (n), dimana (n) merupakan periode tahun berjalan yaitu Tahun 2023.}}$$

Pembangunan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan sampai dengan Juni 2023 adalah sebanyak **20 titik Lokasi** sehingga capaian kinerja IKK04 TW II adalah sebagai berikut :

$$\text{IKK04} = \text{Jumlah s.d 2022} + \text{Realisasi TW II Tahun 2023}$$
$$\text{IKK04} = 283 + 20 = 303 \text{ Lokasi}$$

REALISASI TW II

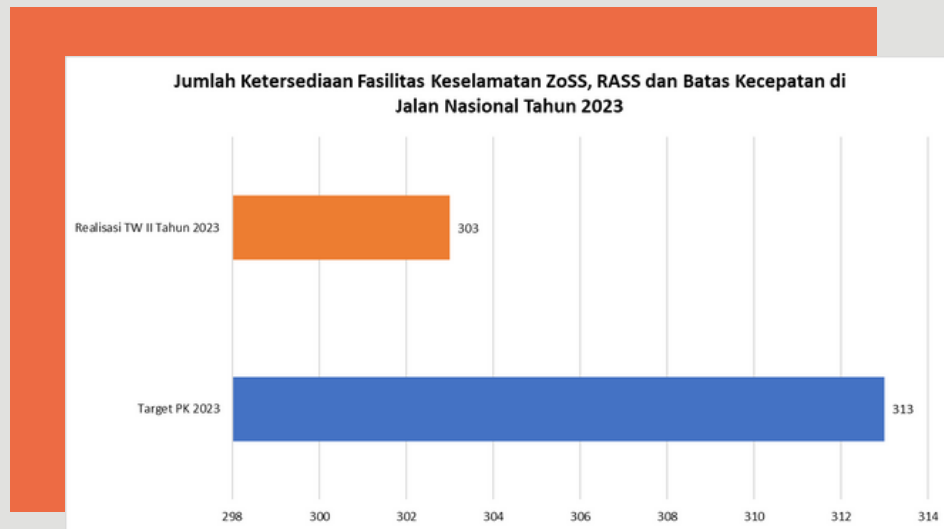
303
Lokasi

Catt. Baseline Tahun 2022 dengan Jumlah Total pembangunan sebanyak 283 Lokasi

Perbandingan Realisasi TW II dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Capaian Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional dari hasil monitoring pembangunan ZoSS, RASS dan Implementasi Batas Kecepatan yang dilaksanakan oleh BPTD pada tahun 2023 pada Triwulan II terdapat **20 (dua puluh) titik lokasi** pembangunan tahun 2023 akan telah dilaksanakan di BPTD Kelas II Banten.

Sehingga pembangunan ZoSS, RASS dan implementasi batas kecepatan sampai dengan tahun 2023 pada Triwulan II adalah sebanyak **303 lokasi**. Jika dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebanyak 313 lokasi maka pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK04 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional Tahun 2023 pada Triwulan II.



Analisa Keberhasilan /Kegagalan

Dalam rangka mencapai keberhasilan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional Direktorat Sarana Transportasi Jalan mengacu pada aturan:

1. PM 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan
2. PM 16 tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
3. SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan yang telah terbangun sampai dengan tahun 2023 Triwulan II adalah sebanyak 303 lokasi.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Jumlah Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan yang telah terbangun di jalan nasional Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 96,81%. Dengan perhitungan rumus sebagai berikut:

Capaian Kinerja TW II terhadap Target Kinerja

$$= \frac{\text{Jumlah Kumulatif Pembangunan Sampai Tahun Ke (n)}}{\text{Target Perjanjian Kinerja Tahun Ke (n)}}$$

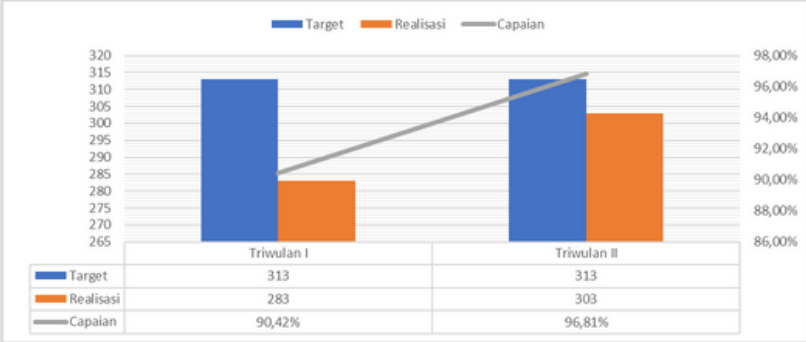
$$\% \text{ Capaian} = (303/313) \times 100\% = 96,81\%$$

Capaian Kinerja TW II
Tahun 2023 terhadap
Target Kinerja

96,81%

Capaian Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional tahun 2023 sebesar 96,481% dari target Perjanjian Kinerja 2023.

Kode	Indikator	TW I			TW II		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKK05	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	313	283	0,00%	313	303	96,81%



Capaian Indikator Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan yang telah terbangun di jalan nasional dengan capaian pada periode Triwulan II yaitu 303 Lokasi.

Faktor belum tercapainya keberhasilan jumlah pembangunan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan yaitu karena adanya penyesuaian anggaran dengan e-Katalog sehingga pada saat ini pembangunan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan masih dalam proses pembangunan.

Dan selain hal tersebut terdapat beberapa pembangunan fasilitas keselamatan yang awalnya direncanakan pada Tahun 2023 menjadi dihapuskan karena *Automatic Adjustment* . Tahun anggaran 2023 terdapat 4 (empat) BPTD yang terkena *Automatic Adjustment* yaitu BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalteng, BPTD Wilayah XVIII Provinsi Sultra, BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo, dan BPTD Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara. Adapun jumlah keseluruhan anggaran terkait indikator Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional tahun 2023 yaitu senilai **Rp280.000.000,-** dan sampai dengan Tahun 2023 triwulan II telah terealisasi sebanyak **Rp160.983.980,- atau sebesar 57,49%.**

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu salah satunya dengan meningkatkan koordinasi dengan BPTD serta peran aktif BPTD untuk melakukan inventarisasi lokasi pembangunan ZoSS, RASS, Batas Kecepatan, melaksanakan bimbingan teknis terkait dengan pembangunan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan kepada BPTD, serta Sosialisasi ZoSS dan RASS Keselamatan Jalan.

Selain kegiatan diatas Direktorat Sarana Tranportasi Jalan melalui Subdit Manajemen Keselamatan sedang membuat aplikasi SiEmka yang mana aplikasi tersebut digunakan untuk mempermudah pengawasan dan perencanaan pembangunan ZoSS, RASS, dan Implementasi Batas Kecepatan yang dilaksanakan oleh BPTD sehingga data yang disajikan lebih akurat dan terdigitalisasi. progres pembangunan Siemka sampai saat ini yaitu telah dilaksanakan *User Accetance Test* (UAT), dan pada saat ini sedang dalam proses perbaikan atau penyempurnaan dari *User Accetance Test* (UAT).

Selain hal tersebut tahun 2023 sedang dilaksanakan kajian Road Map Pembangunan ZoSS dan RASS di seluruh Indonesia.

IKK05

Jumlah ketersediaan taman edukatif



Capaian TW II Indikator IKK05

Berdasarkan Perdirjen Nomor SK._3949-AJ.403-DRJD-2015 tentang Taman Edukatif Keselamatan Transportasi Darat, merupakan produk Dit. Sarana Transportasi Jalan bidang manajemen keselamatan yang bertujuan untuk sosialisasi keselamatan jalan guna meningkatkan keselamatan pada pengguna jalan. Pengenalan akan rambu, marka dan fungsi dari perlengkapan jalan tersebut kepada masyarakat terkhusus anak usia dini agar teredukasi dan sadar akan patuh nya berlalu lintas.

Pembangunan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

Untuk menghitung capaian indikator Jumlah ketersediaan taman edukatif digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKK05} = \frac{\text{Jumlah kumulatif pembangunan taman edukatif sampai dengan tahun ke } n}{\text{Jumlah kumulatif pembangunan taman edukatif sampai dengan tahun ke } n}$$

tahun ke n adalah tahun berjalan yaitu tahun 2023

Dikarenakan untuk **Tahun 2023 tidak ada kegiatan pembangunan Taman Edukatif** maka capaian Kinerja untuk Indikator IKK05 adalah sebagai berikut :

Realisasi TW II

0

Lokasi

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Dit. Sarana TJ Tahun 2023

Pada triwulan II Capaian indikator Jumlah ketersediaan taman edukatif adalah **0 lokasi** Jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebanyak **0 lokasi** maka pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK05 Jumlah ketersediaan taman edukatif.



Analisa Keberhasilan /Kegagalan

Dikarenakan untuk **Tahun 2023 tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan taman edukatif** maka capaian Kinerja untuk Indikator IKK05 adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator Jumlah ketersediaan taman edukatif dengan capaian pada periode TW II yaitu **0 unit** hal ini berarti capaian kinerja sebesar **0%** dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja

$$\% \text{ Capaian} = 0/0 \times 100 \% = 0\%$$

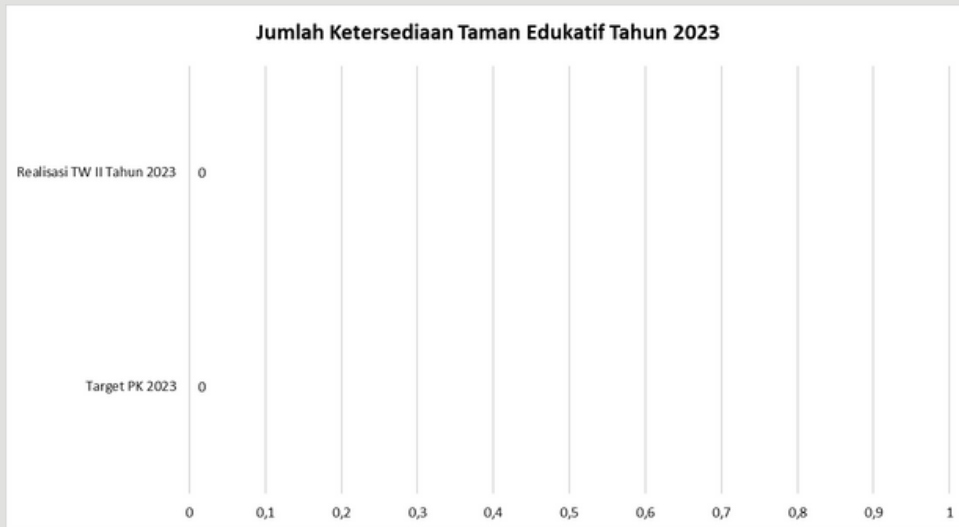


Indikator	TW I			TW II		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

pada tahun 2023 tidak ada anggaran terkait dengan indikator Jumlah ketersediaan taman edukatif tahun 2023.

Perbandingan Realisasi TW II dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Dit. Sarana TJ Tahun 2023

Pada triwulan II Capaian indikator Jumlah ketersediaan taman edukatif adalah **0 lokasi** Jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebanyak **0 lokasi** maka pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK05 Jumlah ketersediaan taman edukatif .



Analisa Keberhasilan /Kegagalan

Dikarenakan untuk **Tahun 2023 tidak ada kegiatan Jumlah ketersediaan taman edukatif** maka capaian Kinerja untuk Indikator IKK05 adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator Jumlah ketersediaan taman edukatif dengan capaian pada periode TW II yaitu **0 unit** hal ini berarti capaian kinerja sebesar **0%** dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja

$$\% \text{ Capaian} = 0/0 \times 100 \% = 0\%$$

Capaian Kinerja
TW II terhadap
Target Kinerja

0%

Indikator	TW I			TW II		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

pada tahun 2023 tidak ada anggaran terkait dengan indikator Jumlah ketersediaan taman edukatif tahun 2023

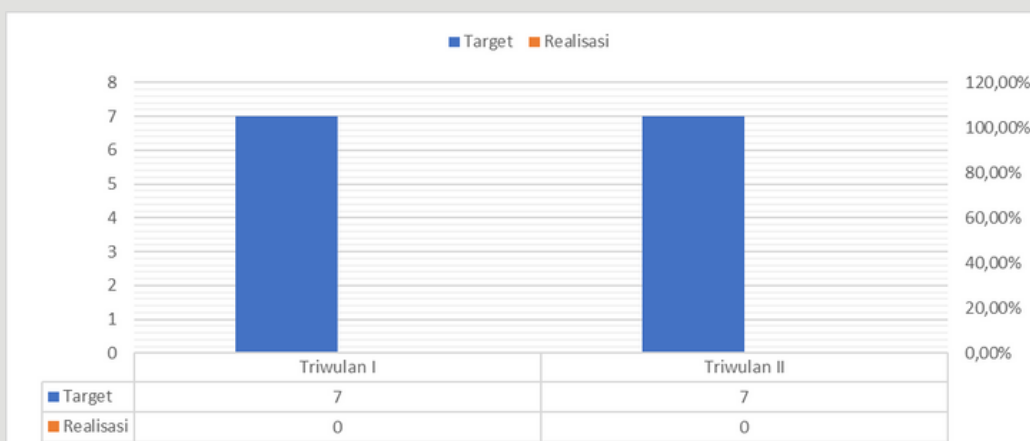
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022 dan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja indikator Jumlah ketersediaan taman edukatif pada tahun 2023 sebanyak **0 lokasi**, sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 realisasi kinerja indikator Jumlah ketersediaan taman edukatif sebanyak 0 Unit, dan pada tahun 2021 realisasi kinerja indikator Jumlah ketersediaan taman edukatif sebanyak 0 Unit sedangkan pada tahun 2020 realisasi kinerja indikator Jumlah ketersediaan taman edukatif sebanyak 0 Unit. dari data tersebut diketahui bahwa realisasi pada tahun 2020 s.d 2023 adalah sebesar 0,00%. Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2023 dengan tahun 2022, 2021 dan 2020 tidak mengalami perubahan / tetap. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Perbandingan Naik / Turun		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	2020	2021	2022
SK03 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat																
1	IKK05	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	Tetap	Tetap	Tetap

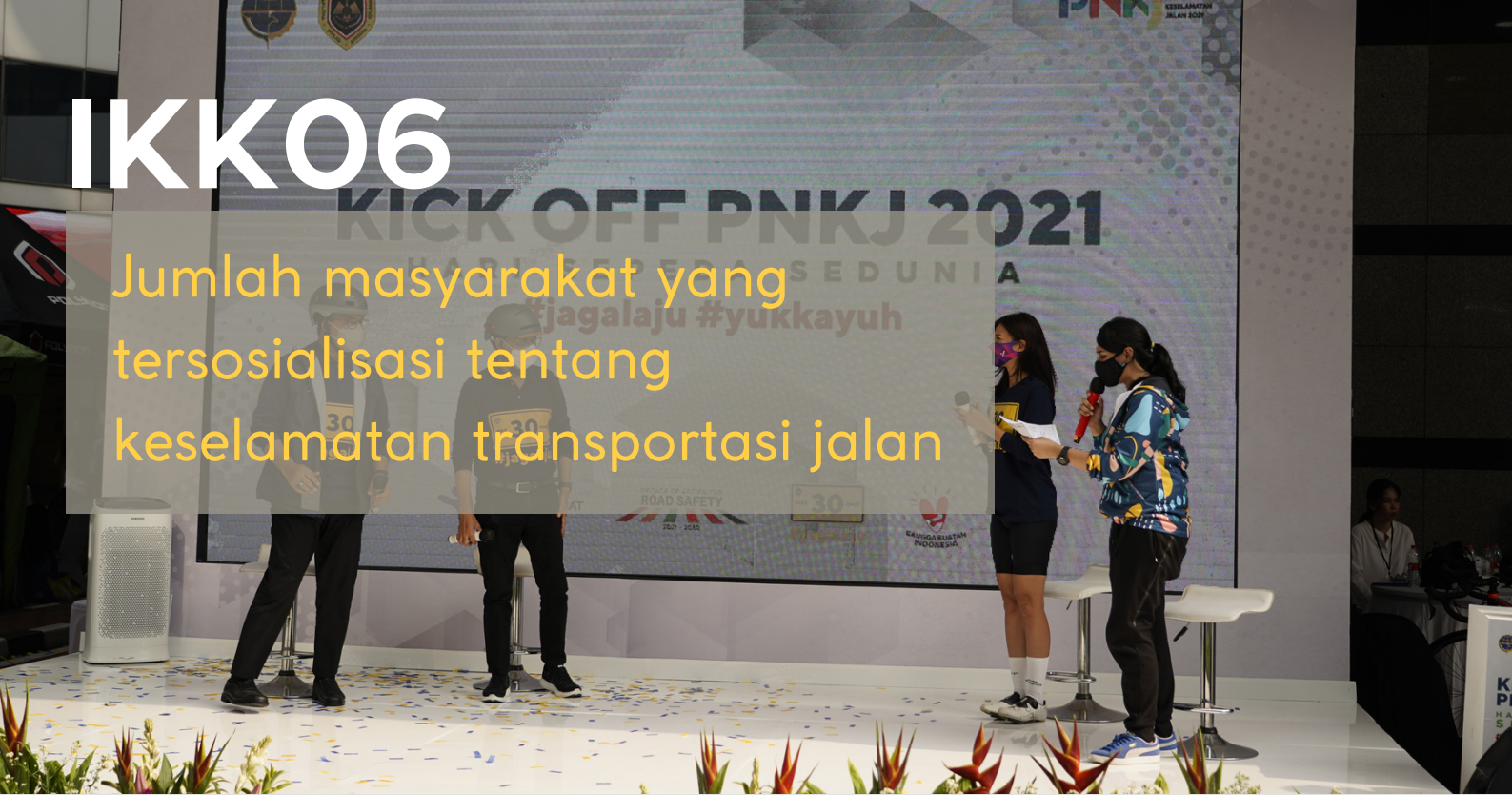
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Renstra Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja indikator Jumlah ketersediaan taman edukatif Tahun 2023 sebanyak **0 lokasi** jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis Direktorat Sarana Transportasi Jalan 2020-2024 sebanyak **7 lokasi** maka capaian kinerja mencapai **0%**. pencapaian digambarkan pada grafik dibawah :



IKK06

Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan



Capaian TW II Indikator IKK06

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat).

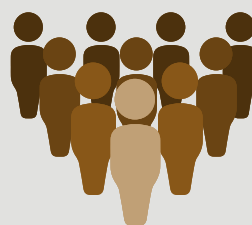
Untuk menghitung capaian indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK06 = \frac{\text{jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada tahun } n}{\text{jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada tahun } n}$$

Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada tahun 2023 triwulan II adalah sebanyak 2026 orang hal ini didapatkan dari hasil pelaksanaan kegiatan Rangkaian dan Puncak Pekan Keselamatan Jalan (PKJ) di 2 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Kick off PNKJ yang dilaksanakan Direktorat Sarana Transportasi Jalan . maka realisasi Kinerja untuk Indikator IKK06 adalah sebagai berikut :

IKK06 = 2026

Realisasi TW IV



21.578
Orang

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Dit. Sarana TJ Tahun 2022

Pada triwulan IV Capaian Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan adalah **21.578 orang** Jika dibandingkan dengan target Revisi PK 2022 sebanyak **20.000 orang** maka pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK06 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2022.



Analisa Keberhasilan / Kegagalan

Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan merupakan tindak lanjut dari Seruan PBB dalam Resolusi No. A/Res/74/299. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada tahun 2022 triwulan IV adalah sebanyak 21.578 orang hal ini didapatkan dari hasil pelaksanaan kegiatan kick off Pekan Nasional Keselamatan Jalan dan . Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2022 triwulan IV terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:

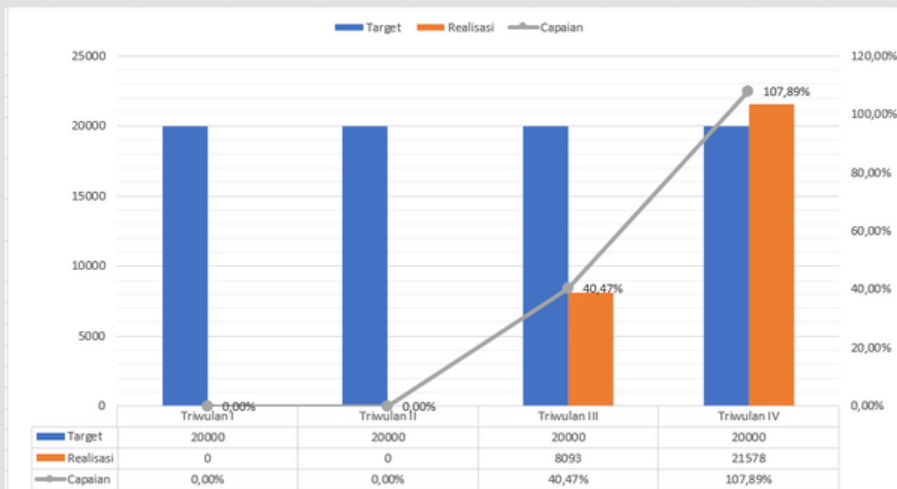
$$\% \text{ Capaian} = 21.578 / 20.000 \times 100 \% = 107,8\%$$

Capaian Kinerja
TW IV terhadap
Target Kinerja

107,8%

Capaian Indikator Kinerja IKK06 ini masih belum maksimal karena pada tahun 2022 ini, Pusat (Direktorat Sarana Transportasi Jalan) dan beberapa Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) tidak dapat melaksanakan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) dikarenakan Automatic Adjustmant (AA). Faktor belum optimalnya pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2022, selain anggaran terkait kegiatan tersebut merata di BPTD, juga pelaporan hasil kegiatan dari tiap BPTD yang melaksanakan Pekan Keselamatan Jalan menghambat pendataan jumlah capaian jumlah masyarakat yang tersosialisasi melalui kegiatan PNKJ.

Kode	Indikator	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKK6	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	20000	-	0%	20000	-	0%	20000	8093	40,47%	20000	21578	107,89%



Capaian Indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dengan capaian pada periode TW IV yaitu **21.578 orang** hal ini berarti capaian kinerja sudah mencapai target dari Revisi PK Tahun 2022.

Adapun anggaran terkait indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2022 yaitu senilai **Rp 3.550.000.000,-** dengan rincian BPTD yang mendapatkan diantaranya BPTD Wilayah II, IV, V, VI, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XXII, XXIII, XXIV, XXV

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Rencana pelaksanaan Puncak Pekan Keselamatan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2023 rencananya akan digelar pada bulan November 2023 sehingga diharapkan dari pelaksanaan kegiatan puncak PNKJ akan menambah peserta / masyarakat yang tersosialisasi keselamatan jalan akan meningkat. Ditambah dengan pelaksanaan PNKJ di 25 BPTD diharapkan dapat mendorong capaian kinerja dimasa datang. selain itu, upaya untuk meningkatkan capaian kinerja adalah dengan penjadwalan pelaksanaan PKJ di BPTD pada tahun anggaran berjalan.

Selain itu untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang diharapkan sosialisasi keselamatan tidak hanya melalui kegiatan pekan keselamatan jalan saja, namun dapat dilakukan dengan sosialisasi keselamatan melalui media sosial yang dapat menjangkau masyarakat lebih banyak.



IKK07

Jumlah fasilitas
pengujian kendaraan
bermotor yang sesuai
standar internasional
(UN-ECE)

Capaian TW I Indikator IKK07

Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.

Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor merupakan jumlah fasilitas/alat pengujian tipe kendaraan yang terdapat di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan bermotor (BPLJSKB) yang telah mengikuti standar UN-ECE. UN-ECE merupakan standar keselamatan kendaraan yang disepakati Komisi Ekonomi PBB dan penerapan standar tersebut di Indonesia telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

IKK07 =

Jumlah Unit fasilitas
pengujian kendaraan
bermotor yang sesuai
dengan standar
internasional
(UN-ECE) dalam n
tahun

Dikarenakan untuk **Tahun 2023 tidak ada kegiatan fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)** maka capaian Kinerja untuk Indikator IKK07 adalah sebagai berikut :

Realisasi TW II

0

Unit

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Dit. Sarana TJ Tahun 2023

Pada triwulan II Capaian Jumlah Unit fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar internasional (UN-ECE) dalam n tahun adalah **0 unit** Jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebanyak **14 Unit** maka pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK07 Jumlah Unit fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar internasional (UN-ECE) dalam n tahun.



Analisa Keberhasilan /Kegagalan

Capaian Kinerja untuk Indikator IKK07 adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = 0/14 \times 100 \% = 0\%$$

**Capaian Kinerja TW II
terhadap Target
Kinerja**

0%

Capaian Kinerja jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar UN-ECE berdasarkan pembangunan fasilitas uji sesuai kesepakatan dalam ASEAN MRA, dimana saat ini masih dalam tahapan pembangunan proving ground yang direncanakan pada tahun 2025 nanti sudah selesai.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021

Perbandingan realisasi kinerja indikator Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE) pada tahun 2022 sebanyak **0 Unit** apabila dibandingkan dengan target kinerja pada Renstra tahun 2022 sebanyak **10 Unit**, maka capaian kinerja mencapai **0 %** sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 realisasi kinerja indikator Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE) sebanyak **0 Unit** dengan target sebanyak **6 Unit** sehingga capaian kinerja sebesar **0%**. Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2021 dengan tahun 2020 tidak mengalami perubahan / tetap. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK4. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Jalan														
1.	IKK07 - Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai Standar	3	0	0%	6	0	0%	10	0	0%	14	0	0%	TETAP

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Renstra Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja indikator Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE) Tahun 2023 sebanyak **0 Unit** jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis Direktorat Sarana Transportasi Jalan 2020-2024 sebanyak **14 Unit** maka capaian kinerja mencapai **0%**. pencapaian digambarkan pada grafik dibawah :



IKK08

Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Capaian Tahun 2023 Indikator IKK08

Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah komulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah kabupaten kota seluruh Indonesia dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta.

Untuk menghitung capaian indikator Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKK08} = \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun n}}{\text{(Jumlah Pemda dan UPUBKB Swasta (APM))}} \times 100 \%$$

Dari jumlah kabupaten dan kota serta pengujian swasta yang ada sebanyak **515 Kab/Kota** sedangkan Jumlah komulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan akhir Juni tahun 2023 adalah sebanyak 350 UPUBKB sehingga Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

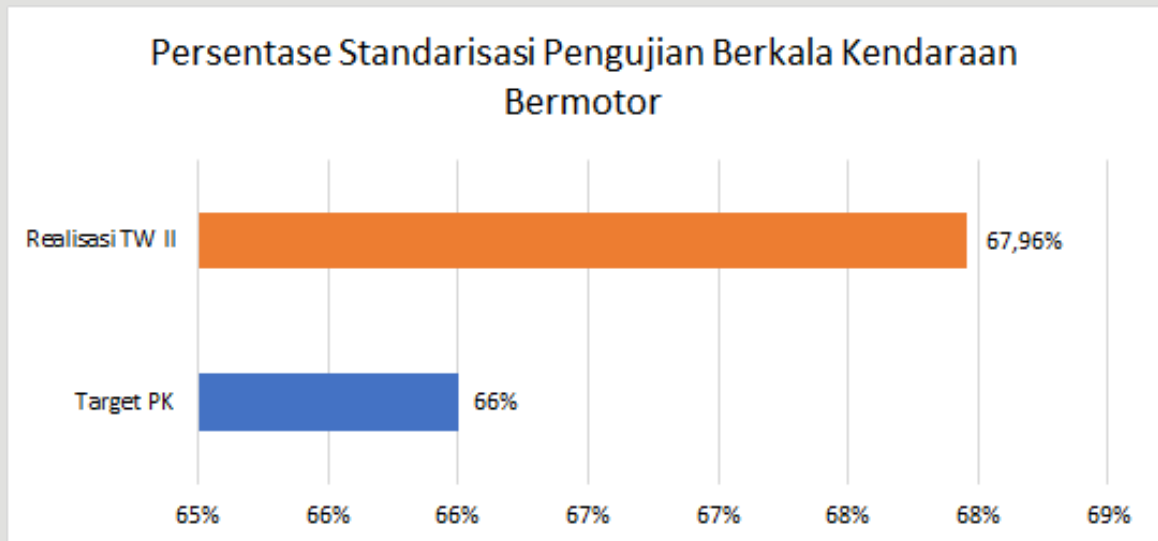
$$\text{IKK08} = (350/515) \times 100\% = 67,96\%$$

Realisasi TW II

67,96%

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Dit. Sarana TJ Tahun 2023

Realisasi Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada tahun 2023 adalah **67,96%**. Jika dibandingkan dengan target PK sebesar **66%** maka pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK08 Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Transportasi Jalan Tahun 2023.



Analisa Keberhasilan / Kegagalan

Realisasi dari Indikator Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada tahun 2023 adalah sebesar 67,96%.

Capaian kinerja Indikator Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = 67,96/66 \times 100 \% = 102,97\%$$

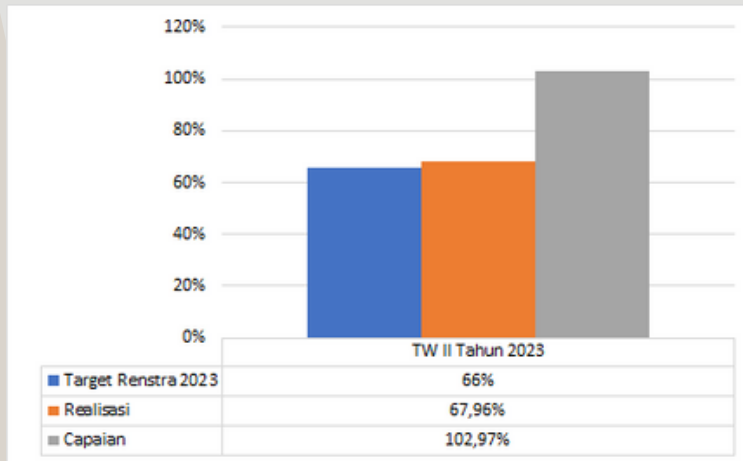
Capaian Kinerja
Tahun 2023
terhadap
Target PK
Tahun 2023

102,97%

Capaian Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2023 sebesar **102,96%** dari target PK 2023.

Adapun hal hal yang mendukung tercapainya target kinerja diatas antara lain :

1. Pelaksanaan beberapa kegiatan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan yaitu akreditasi UPUPKB, monitoring dan evaluasi UPUBKB, perawatan dan pengkalibrasian alat kalibrasi, pencetakan bukti lulus uji, Pencetakan Sertifikat Kalibrasi, Stiker Tanda Kalibrasi dan Sertifikat Akreditasi.
2. Membuat suatu kebijakan dimana Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang diijinkan beroperasi harus sudah terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga hal ini memaksa Pemerintah Daerah untuk segera melakukan pembenahan baik dari segi administrasi maupun teknis untuk proses pengajuan permohonan akreditasi UPUBKB.
3. Membuat kebijakan terkait Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) dimana setiap pengujian sudah tidak lagi menggunakan buku uji dan juga melakukan peningkatan spek daripada BLUe untuk peningkatan kualitas dan level keamanan.



Kode	Indikator	TW II		
		Target	Realisasi	Capaian
IKK 08	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala	66	67,96	102,97

Realisasi Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada Tahun 2023 yaitu **67,96%**.

Adapun anggaran terkait indikator Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2023 yaitu senilai Rp 25.064.000.000,- dan sampai dengan triwulan II telah terealisasi senilai Rp 9.467.401.628,- atau sebesar 37,77%.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase
Pengadaan Secure Access Module (SAM)	Rp 200.000.000	Rp -	0,00%
Pencetakan Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi Penguji Berkala Kendaraan	Rp 200.000.000	Rp -	0,00%
Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi	Rp 800.000.000	Rp -	0,00%
Pencetakan Sertifikat Kalibrasi, Stiker Tanda Kalibrasi dan Sertifikat Akreditasi	Rp 200.000.000	Rp -	0,00%
Pencetakan Bukti Lulus Uji Berkala	Rp 22.000.000.000	Rp 8.760.000.000	39,82%
Akreditasi UPUBKB	Rp 960.000.000	Rp 373.350.028	38,89%
Monitoring Pelayanan Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 234.000.000	Rp 233.989.900	100,00%
Monitoring dan Evaluasi UPUBKB	Rp 470.000.000	Rp 100.061.700	21,29%
TOTAL	Rp 25.064.000.000	Rp 9.467.401.628	37,77%

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang antara lain :

1. Perlu dilakukannya sosialisasi kepada Dinas Perhubungan di Seluruh Indonesia tentang proses dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan Akreditasi UPUBKB baik permohonan baru maupun perpanjangan.
2. Perlu adanya alokasi anggaran akreditasi UPUBKB yang cukup memadai guna menunjang percepatan proses akreditasi UPUBKB di seluruh Indonesia. Untuk saat ini Jumlah UPUBKB yang ada di Indonesia berjumlah 515 UPUBKB dan baru 350 UPUBKB yang terakreditasi. Hal ini artinya masih ada 165 UPUBKB yang belum terakreditasi.
3. Dilakukannya akreditasi online untuk permohonan akreditasi perpanjangan yang bekerjasama dengan BPTD Setempat. hal ini juga menjadi salah satu upaya Direktorat Sarana Transportasi Jalan untuk mempercepat proses permohonan akreditasi perpanjangan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

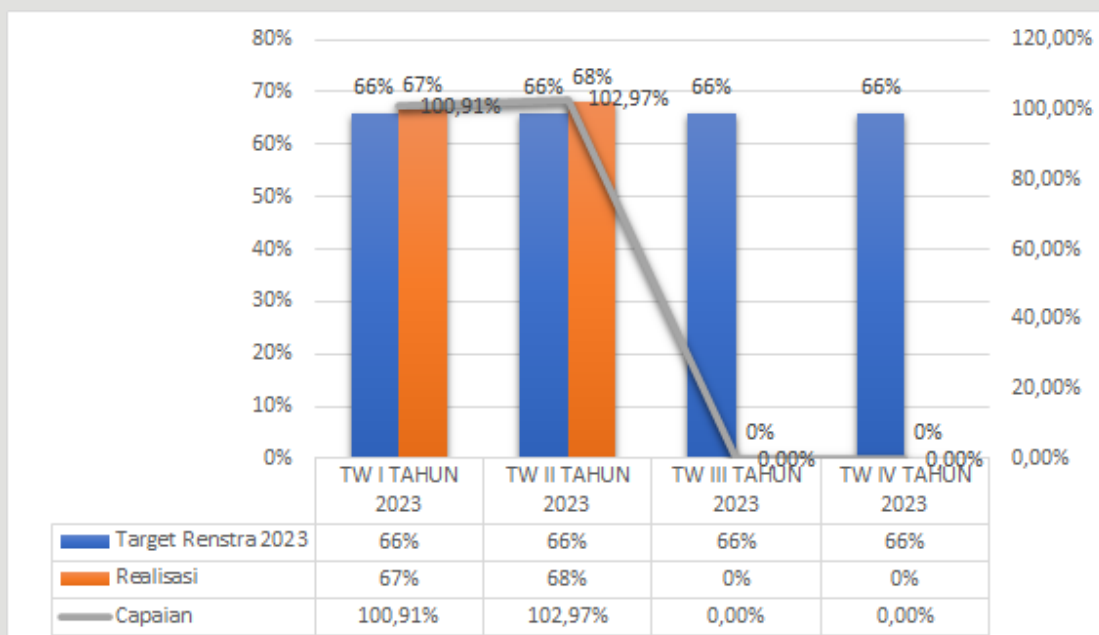
Realisasi kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2023 sebesar 67,96% jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebesar 66% maka capaian kinerja mencapai 102,97% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2022, capaian kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebesar 65,43% dengan target pada Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2022 sebesar 62% maka capaian kinerja mencapai 105,53%. Pada tahun 2021, capaian kinerja persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebesar 60,97%, jika dibandingkan dengan target pada Revisi PK Tahun 2021 sebesar 60% maka capaian kinerja mencapai 101,61%. Untuk rincian capaian pada Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
SK 04 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat										
1	IKK 08	60%	61%	101,61%	62%	65,43%	105,53%	66%	67,96%	102,97%

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 Dalam Renstra Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024

Capaian IKK Persentase standarisasi fasilitas pengujian kendaraan bermotor Tahun 2023 sebesar 67,96% jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Sarana Transportasi Jalan untuk tahun 2023 sebesar 66% maka capaian kinerja mencapai 102,97%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2022 sebesar 62% maka capaian kinerja mencapai 105,53%. Pencapaian kinerja pada tahun 2023 digambarkan pada gambar berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra Direktorat Sarana Transportasi Jalan 2020-2024



IKK09

Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan

Definisi Indikator Kinerja

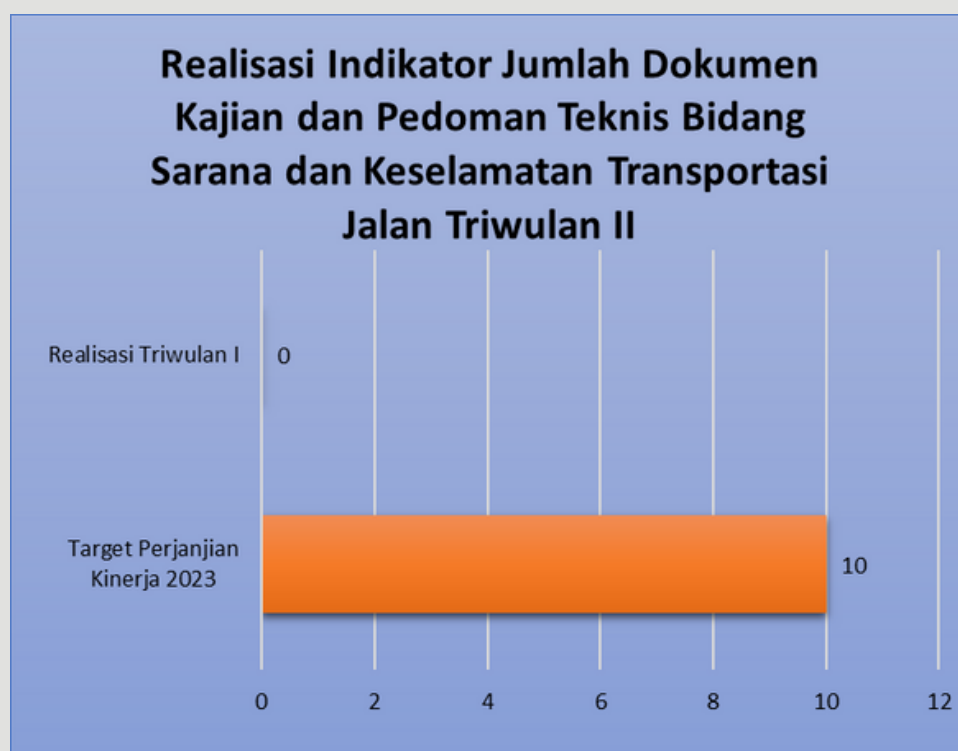
Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan adalah jumlah kegiatan studi yang dilaksanakan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Untuk menghitung capaian indikator Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKK09} = \frac{\text{Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan pada tahun } n}{\text{Target}}$$

Perbandingan Realisasi TW II dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Dit. Sarana TJ Tahun 2023

Capaian Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2023 Triwulan I Tahun 2023 sebesar **0 Dokumen** jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar **10 Dokumen** maka pencapaian ini digambarkan pada grafik sebagai berikut:



Analisa Keberhasilan / Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Sehingga dalam hal ini Direktorat Sarana Transportasi Jalan melaksanakan kajian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyusunan NSPK.

Pada tahun 2023 Direktorat Sarana Transportasi Jalan melaksanakan kegiatan studi atau penyusunan dokumen teknis sebanyak **0 kajian** sampai dengan bulan Maret 2023 kajian yang sudah selesai sebanyak **10 kajian** sehingga capaian TW II adalah sebagai berikut :

IKK09= 10 Dokumen



Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2023 triwulan II adalah sebanyak 0 dokumen. Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2023 triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebanyak 0 dokumen adalah **0%**

% Capaian = $0/10 \times 100\% = 0\%$



Adapun anggaran terkait Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2023 yaitu senilai **Rp 6.250.000.000,-** dan sampai dengan Tahun 2023 triwulan II telah terealisasi sebanyak **Rp 0,-** atau **0 %**.

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang perlu dipercepat proses pengadaan jasa konsultansinya dengan harapan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kajian lebih efektif. Dan harapan ke depan Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Jalan Tahun 2023 untuk dapat dijadikan pedoman teknis dalam peningkatan keselamatan Bidang Sarana Transportasi Jalan yang lebih baik.

Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan



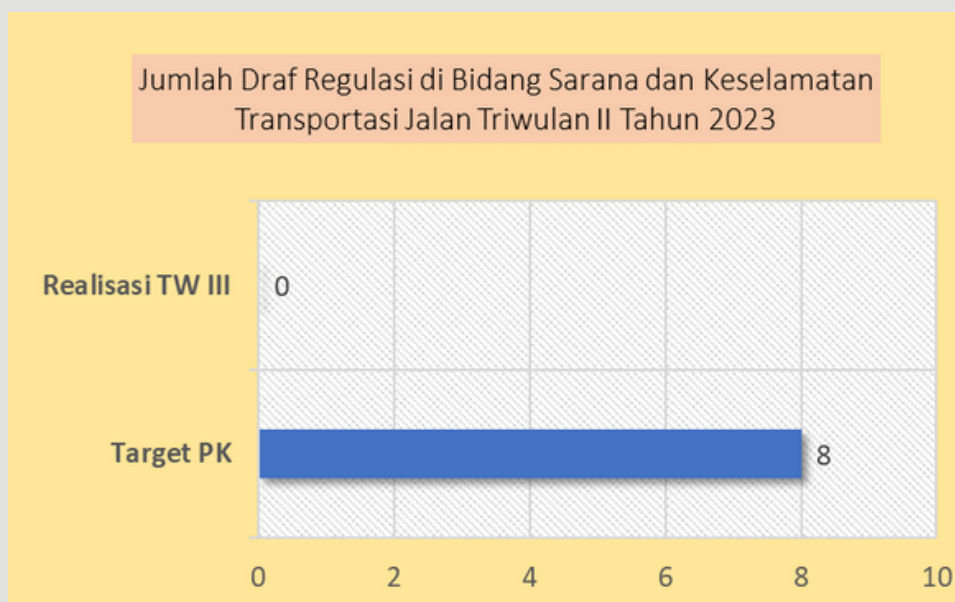
Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan adalah jumlah draf regulasi atau peraturan yang disusun oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Untuk menghitung capaian indikator Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK10 = \frac{\text{Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan pada tahun } n}{\text{Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan pada tahun } n}$$

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Dit. Sarana TJ Tahun 2023

Capaian Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2023 Triwulan II sebesar **0 Draf** jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar **8 Draf** maka pencapaian ini digambarkan pada grafik sebagai berikut:



Analisa Keberhasilan / Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Sehingga dalam hal ini Direktorat Sarana Transportasi Jalan melaksanakan penyusunan draft regulasi dalam rangka melaksanakan tugas penyusunan NSPK. Draft Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2023 triwulan II adalah sebanyak **7 Draft** dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Jumlah Draft Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2023 triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sampai dengan bulan Juni 2023 Direktorat Sarana Transportasi Jalan telah menyelesaikan 7 draft peraturan sehingga capaian TW II adalah sebagai berikut :

IKK10 = 7 Draft



Capaian Jumlah Draft Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan dengan capaian pada periode TW II yaitu **0 draf** dari target **8 draft** hal ini berarti capaian kinerja sebesar **0,00 %**.

% Capaian = 0/8 x 100 % = 0,00 %

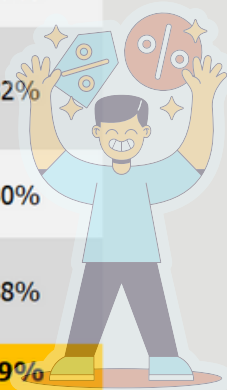


Draft Regulasi 2023 Dit. STJ :

1. Draft Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai;
2. Draft Peraturan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Dan Kereta Tempelan
3. Draft Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kendaraan Bermotor Kustom
4. Draft Peraturan Menteri Perhubungan tentang Akreditasi Perusahaan Karoseri
5. Draft Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor Roda Tiga
6. Draft Keputusan Dirjen Pedoman Perhitungan JBI dan JBKI untuk mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dan kendaraan penarik beserta kereta tempelan atau gandengan
7. Draft Keputusan Dirjen tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan

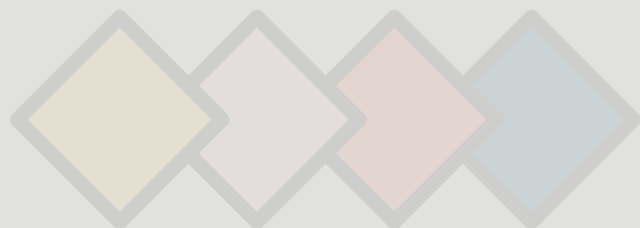
Adapun anggaran terkait Jumlah Draft Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2023 yaitu senilai **Rp 1.120.000.000,-** dan sampai dengan Tahun 2023 triwulan II telah terealisasi sebanyak **Rp 327.704.340,-** atau **29%**.

NO	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Penyusunan Pedoman Teknis Bidang Kemitraan dan Promosi	280.000.000	47.000.000	17%
2	Penyusunan NSPK Bidang Uji Tipe	280.000.000	88.918.000	32%
3	Penyusunan NSPK Bidang Uji Berkala	280.000.000	84.999.900	30%
4	Penyusunan NSPK Bidang Manajemen Keselamatan	280.000.000	106.786.440	38%
TOTAL		1.120.000.000	327.704.340	29%



Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang perlu dilaksanakan pembahasan terkait dengan draf peraturan - peraturan lebih efektif dengan menggunakan anggaran yang ada



IKK11

Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor

Capaian Kinerja Tahun 2023 Indikator IKK11

Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor adalah jumlah sertifikasi penguji kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan melalui kegiatan Peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor (Diklat) dan uji kompetensi penguji kendaraan bermotor yang bekerjasama dengan BPSPDM Perhubungan. Untuk menghitung capaian indikator Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor digunakan rumus sebagai berikut:

IKK11 =

Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor pada tahun n

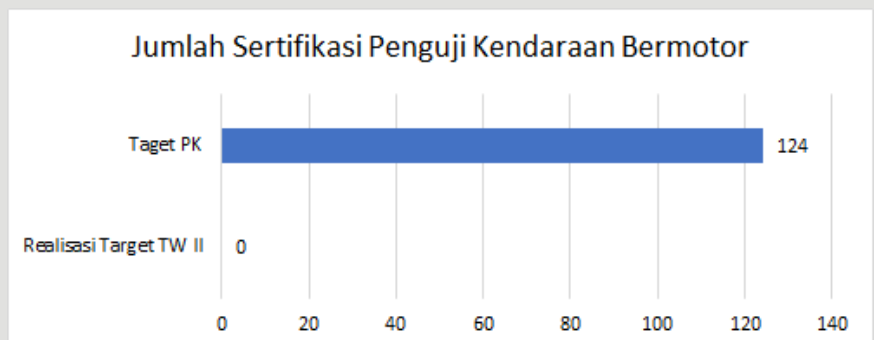
Hingga akhir bulan Maret Tahun 2023, Direktorat Sarana Transportasi Jalan belum melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi dan Peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor sehingga capaian kinerja Tahun 2023 adalah **0 Sertifikat**

Realisasi TW II



Target VS Realisasi

Direktorat Sarana Transportasi Jalan belum melakukan kegiatan Peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor (Diklat) dan uji kompetensi, sehingga realisasi Indikator Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor tahun 2023 sebesar 0 Sertifikat. Jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar **124 Sertifikat** maka pencapaian ini digambarkan pada grafik sebagai berikut:



Analisa Keberhasilan/Kegagalan

$$\% \text{ Capaian} = 0/124 \times 100 \% = 0\%$$

Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor tahun 2023 adalah sebanyak 0 sertifikat. Dengan demikian, capaian Indikator Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah 0%.

**Capaian Kinerja
Tahun 2023
terhadap
Target Kinerja**

0%

Kode	Indikator	TW II		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
IKK11	Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan	124	0	0,00%

Adapun anggaran terkait Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor tahun 2023 yaitu senilai **Rp.1.617.000.000,-** dan sampai dengan Tahun 2023 triwulan II telah terealisasi sebanyak **Rp.0,-** atau **0%**.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Peningkatan Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor	Rp 917.000.000	Rp -	0,00%
2	Uji Kompetensi Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor	Rp 700.000.000	Rp 49.341.600	7,05%
TOTAL		Rp 1.617.000.000	Rp 49.341.600	3,05%

Hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian kinerja indikator Jumlah sertifikasi penguji kendaraan bermotor antara lain :

1. Adanya alokasi anggaran kegiatan peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor dan uji kompetensi penguji kendaraan bermotor sehingga memberikan kesempatan penguji kendaraan bermotor untuk dapat meningkatkan kompetensi yang mereka miliki.
2. Besarnya antusiasme dari para penguji dari Seluruh Indonesia untuk meningkatkan kompetensi yang mereka miliki melalui keikutsertaan pada kegiatan peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor dan uji kompetensi penguji kendaraan bermotor.
3. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan baik dari segi pengalokasian anggaran pengiriman diklat maupun dukungan moril kepada pegawainya untuk meningkatkan kompetensinya.
4. Koordinasi yang baik antara Direktorat Sarana Transportasi Jalan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dalam penyelenggaraan uji kompetensi dan peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor.

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang antara lain :

1. Menyusun jadwal dan mempercepat pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor dan Uji Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
2. Melakukan sosialisasi kepada Dinas Perhubungan di Seluruh Indonesia tentang pentingnya meningkatkan SDM Penguji Kendaraan Bermotor demi peningkatan kualitas pelayanan bidang pengujian kendaraan bermotor
3. Meningkatkan kerjasama yang sudah terjalin dengan Badan Pengembangan SDM Perhubungan baik dalam hal kurikulum/materi diklat maupun proses pelaksanaan uji kompetensinya.

IKK12

Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan

Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan adalah jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan yang dilaksanakan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Untuk menghitung capaian indikator Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

IKK11 =

Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan pada tahun n

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Dit. Sarana TJ Tahun 2023

Pelaksanaan beberapa Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan pada tahun 2023 Direktorat Sarana Transportasi Jalan telah dilaksanakan di beberapa daerah dan sampai dengan Maret 2023 sebanyak **906 peserta**



Analisa Keberhasilan / Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan memiliki tugas melaksanakan bimbingan teknis di bidang sarana transportasi jalan. sehingga pada tahun 2023 Direktorat Sarana Transportasi Jalan melaksanakan beberapa bimbingan teknis sebagai berikut

NO	Kegiatan	Peserta
1	Bimbingan Teknis Keselamatan Jalan Anak Usia Sekolah	-
2	Bimbingan Teknis Manajemen Kampanye Keselamatan Transportasi Jalan	-
3	Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi AKAP	43
4	Program Aksi Keselamatan Berkendara	-
5	Peningkatan Kapasitas SDM Direktorat Sarana Transportasi Jalan	-
6	Peningkatan Kapasitas SDM Direktorat Sarana Transportasi Jalan di Luar Negeri	-
7	Penyertaan Pegawai Dalam Pelatihan dan Diklat	110
8	Peningkatan Kompetensi Petugas Kalibrasi Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-
9	Pembinaan Teknis Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor	130
10	Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Kendaraan Bermotor	-
11	Pembinaan Teknis petugas pemeriksa BAP Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	-
12	Surveillance ISO Pelayanan Sertifikat Uji Tipe dan Rancang Bangun	-
13	Pembinaan Teknis Penyegaran Penguji Kendaraan Bermotor	264
14	Pembinaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	-
15	Pembinaan Teknis Petugas Kalibrasi BPTD	-
16	Pembinaan Teknis Manajemen Kecepatan	-
17	Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumentasi SMK Perusahaan Angkutan Umum	359
18	Pembinaan Teknis Penilai Dokumen SMK PAU	-
19	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan Tingkat Nasional	-
20	Witness Uji Emisi Luar Negeri	-
21	Pembinaan Teknis Kompetensi Inspektur Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	-
TOTAL		906

Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2023 triwulan I adalah sebanyak **906 orang**. Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2023 triwulan I terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah **60 %**.

IKK12 = 906

Realisasi TW I

906
Orang

% Capaian = 906/1287 x 100 % = 70%

Capaian Kinerja
TW I Terhadap
Target Kinerja

70%

Adapun anggaran terkait Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2023 sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Bimbingan Teknis Keselamatan Jalan Anak Usia Sekolah	470.000.000	47.000.000	10%
2	Bimbingan Teknis Manajemen Kampanye Keselamatan Transportasi Jalan	480.000.000	-	0%
3	Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi AKAP	380.000.000	87.000.000	23%
4	Program Aksi Keselamatan Berkendara	727.000.000	50.000.000	7%
5	Peningkatan Kapasitas SDM Direktorat Sarana Transportasi Jalan	113.162.000	-	0%
6	Peningkatan Kapasitas SDM Direktorat Sarana Transportasi Jalan di Luar Negeri	1.120.000.000	-	0%
7	Penyertaan Pegawai Dalam Pelatihan dan Diklat	199.000.000	52.160.475	26%
8	Peningkatan Kompetensi Petugas Kalibrasi Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	380.000.000	-	0%
9	Pembinaan Teknis Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor	380.000.000	126.560.000	33%
10	Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Kendaraan Bermotor	380.000.000	-	0%
11	Pembinaan Teknis petugas pemeriksa BAP Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	300.000.000	-	0%
12	Surveillance ISO Pelayanan Sertifikat Uji Tipe dan Rancang Bangun	380.000.000	-	0%
13	Pembinaan Teknis Penyegaran Penguji Kendaraan Bermotor	364.400.000	3.599.672.000	988%
14	Pembinaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	380.000.000	-	0%
15	Pembinaan Teknis Petugas Kalibrasi BPTD	380.000.000	-	0%
16	Pembinaan Teknis Manajemen Kecepatan	370.000.000	47.173.890	13%
17	Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumentasi SMK Perusahaan Angkutan Umum	674.000.000	47.175.000	7%
18	Pembinaan Teknis Penilai Dokumen SMK PAU	480.000.000	47.173.890	10%
19	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan Tingkat Nasional	780.000.000	46.925.250	6%
20	Witness Uji Emisi Luar Negeri	400.000.000	-	0%
21	Pembinaan Teknis Kompetensi Inspektur Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	268.000.000	471.577.240	176%
TOTAL		9.405.562.000	4.622.417.745	49,15%

Adapun anggaran terkait Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan senilai **Rp 9.405.562.000,-** dan sampai dengan Tahun 2023 triwulan I telah terealisasi sebanyak **Rp 0,-** atau **0%**.



SK5

Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Direktorat Sarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Dukungan teknis transportasi darat. Adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA

IKK1

Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Definisi Indikator Kinerja

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- Aspek Perencanaan;
- Aspek Kepegawaian (SDM);
- Aspek Keuangan;
- Aspek Hukum dan Kerjasama.

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat menggunakan 1 (satu) IKK yaitu Indeks Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah

Kode	Indikator		
SK5	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dukung teknis transportasi darat		
IKK1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat		
	Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2
	Target	87	87
	Realisasi	87	87
	Capaian	100%	100%

Analisa Keberhasilan / Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan memiliki tugas melaksanakan bimbingan teknis di bidang sarana transportasi jalan. sehingga pada tahun 2023 Direktorat Sarana Transportasi Jalan melaksanakan beberapa bimbingan teknis sebagai berikut

Periode TW II **penilaian terkait dengan indikator Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis** dari Sesditjen Perhubungan Darat Transportasi Darat maka capaian Kinerja untuk Indikator IKK1 adalah sebagai berikut :

Capaian TW III

87

Nilai

Adapun anggaran terkait indikator Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 18.252.656.000** dengan realisasi anggaran samapai dengan TW II adalah sebesar **Rp. 3.397.953.682** atau **18,61%**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan teknis transportasi darat diperoleh dari:

- Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan dengan bobot nilai sebesar 25;
- Indeks profesionalisme ASN dengan bobot nilai sebesar 25;
- Tingkat pengelolaan keuangan dengan bobot nilai sebesar 25;
- Tingkat pengelolaan hukum dan humas dengan bobot nilai sebesar 25.

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat berhasil karena adanya dukungan Pimpinan unit kerja dalam hal penyediaan anggaran untuk penyusunan dokumen, peningkatan kompetensi SDM, kontrol terhadap pencapaian daya serap anggaran, dan merancang kebijakan yang sesuai dengan isu-isu di tahun 2022. Sehingga capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25
1	SAKIP	
a	Rencana Strategis (Renstra)	3
b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2
c	Perjanjian Kinerja (PK)	2
d	Rencana Aksi (Renaksi)	2
e	Input Aplikasi e-Performance	1
f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II, III	2
g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	3
2	Input Aplikasi e-Planning	10
B	Indeks Profesionalisme ASN	25
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6
2	Kompetensi	10
3	Kinerja	8
4	Disiplin	1
C	Tingkat Pengelolaan Keuangan	25
1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10
2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10
3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	5
D	Tingkat Pengelolaan Hukum dan Humas	25
1	Penyusunan NSPK	7
2	Pengelolaan Informasi Publik	6
3	Penyusunan Perjanjian dan Kerjasama	6
4	Pelaksanaan Advokasi Hukum	6
TOTAL NILAI		100

Capaian Realisasi Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat
=25 + 25 + 20 + 17 = 87

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

Sehingga : $\% \text{ Capaian} = (\text{Realisasi 2023} / \text{Target 2023}) \times 100\%$

$$\% \text{ Capaian} = (87/87) \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Faktor-faktor keberhasilan dalam pelaksanaan indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2023, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Adanya dukungan Pimpinan unit kerja dalam hal penyediaan anggaran untuk penyusunan dokumen, peningkatan kompetensi SDM, kontrol terhadap pencapaian daya serap anggaran, dan merancang kebijakan yang sesuai dengan isu-isu di tahun 2022.
- Adanya pengawasan dari pimpinan terkait pelaksanaan Dukungan Teknis Transportasi Darat yang dapat dilakukan dengan secara online melalui aplikasi e-performance, e-monitoring, e-SAKIP review, dll;

Faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2023, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Adanya beberapa refocusing anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Adapun anggaran terkait indikator Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 18.252.656.000** dengan realisasi anggaran samapai dengan TW II adalah sebesar **Rp. 3.397.953.682** atau **18,61%**

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Membuat timeline penyusunan dokumen SAKIP, input aplikasi e-planning dan pelaksanaan penyerapan anggaran;
2. Memberikan apresiasi atau penghargaan kepada pegawai yang memiliki kinerja baik dan teguran atau sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi kinerjanya;
3. Berkoordinasi secara rutin dengan instansi dan unit kerja terkait penyusunan dokumen SAKIP, e-Planning dan pengelolaan anggaran.
4. Melakukan kajian terhadap isu perkembangan atau permasalahan transportasi umum yang akan dijadikan kebijakan.
5. Melakukan analisis dan evaluasi atas peraturan yang sudah terbit terhadap relevansi pada kondisi saat ini.



SP02

Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Direktorat Sarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam peningkatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Direktorat Sarana Transportasi Jalan mempunyai kontribusi dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA

IKP01 Indeks RB Kementerian
Perhubungan

IKP01

Indeks RB Kementerian Perhubungan

REALISASI 2023

88

CAPAIAN KINERJA

100%

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas

Capaian TW II Indikator IKP01

Penilaian Indeks RB Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Kemen PAN RB dan diukur dari pelaksanaan program reformasi Birokrasi dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Dikarenakan untuk periode TW II untuk indikator Indeks RB Kementerian Perhubungan masih dalam evaluasi oleh Kemen PAN RB maka capaian Kinerja untuk Indikator IKP01 adalah sebagai berikut :

Capaian TW II

88

Nilai

Adapun anggaran terkait Indeks RB Kementerian Perhubungan tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 279.698.000** dengan realisasi anggaran samapai dengan Maret TW II adalah sebesar **Rp. 61.606.000** atau **95,22%**

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan 2 (dua) IKP salah satunya yaitu Indeks RB Kementerian Perhubungan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah :

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM			
SP02	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	satuan :	
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2
	Target	88	88
	Realisasi	88	88
	Capaian	100%	100%

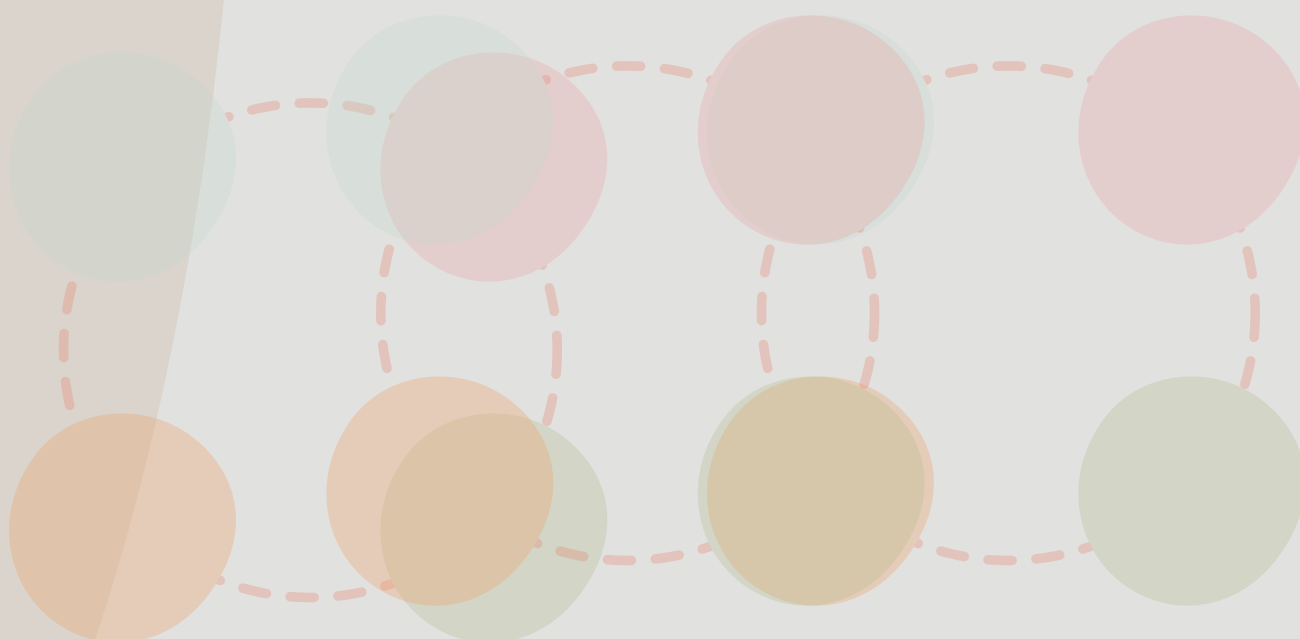
Capaian nilai evaluasi RB Kementerian Perhubungan tahun 2023 pada Triwulan II masih merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun sebelumnya. Dimana nilai tersebut merupakan gambaran pencapaian atas pemenuhan komponen dan sub-komponen pada tabel pembobotan. Untuk lebih jelasnya rincian hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel

A.	Pengungkit	Bobot	Nilai
I. Pemenuhan (20)		20	17,51
1	Manajemen Perubahan	2	2,0
2	Deregulasi Kebijakan	2	1,64
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	3	2,77
4	Penataan Tatalaksana	2,5	2,79
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	3	2,96
6	Penguatan Akuntabilitas	2,5	2,56
7	Penguatan Pengawasan	2,5	2,45
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,5	2,34
II. Hasil Antara Perubahan (10)		10	7,91
1	Kualitas Pengelolaan Arsip	1	0,99
2	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	0,78
3	Kualitas Pengelolaan Keuangan	1	0,7
4	Kualitas Pengelolaan Aset	1	0,7
5	Merit System	1	0,75
6	ASN Profesional	1	0,73
7	Kualitas Perencanaan	1	0,99
8	Maturitas SPIP	1	0,65
9	Kapabilitas APIP	1	0,65
10	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009	1	0,97
III. Reform (30)		30	26,58
1	Manajemen Perubahan	3	2,95
2	Deregulasi Kebijakan	3	2,98
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	4,5	3,68
4	Penataan Tatalaksana	3,75	3,55
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	4,5	3,69
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	2,74
7	Penguatan Pengawasan	3,75	3,64
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,35
Total Pengungkit		60	52

B.	Hasil (40)	Bobot	Nilai
1	Akuntabilitas Keuangan (10)	10	13,67
a.	Opini BPK (3)	3	5,44
b.	Nilai Sakip (7)	7	8,23
2	Kualitas Pelayanan Publik (10)	10	9,21
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)		10	9,21
3	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10)	10	8,79
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)		10	8,79
4	Kinerja Organisasi (10)	10	16,2
a.	Capaian Kinerja	5	4,33
b.	Kinerja Lainnya	2	6,43
c.	Survei Internal Organisasi	3	5,44
Total Hasil		40	36
Total Evaluasi Reformasi Birokrasi		100	88

Berdasarkan Capaian Indeks RB Kementerian Perhubungan tahun 2023 atas pemenuhan PMPRB adalah sebesar 88, yang didapat berdasarkan nilai pemenuhan LKE PMPRB yang disampaikan kepada KemenPANRB pada tahun 2023. Nilai tersebut merupakan nilai RB pada tingkat Kementerian dan tidak dijabarkan hingga level Eselon I. Sehingga nilai Indeks RB Ditjen Perhubungan Darat masih menggunakan nilai pada tingkat kementerian yaitu sebesar 88.

Capaian Indeks RB Kementerian Perhubungan tahun 2023 adalah sebesar **88** jika dibandingkan dengan target PK 2023 sebesar **88** maka capaian kinerja mencapai **100%**. Pencapaian ini digambarkan pada grafik



Analisa Keberhasilan / Kegagalan

Dasar Hukum

Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan RI memiliki dasar hukum sebagai dasar acuan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, diantaranya yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 234 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2020-2024.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, menargetkan sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
2. Birokrasi yang Kapabel
3. Pelayanan Publik yang Prima

Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN), diarahkan dalam 4 (empat) strategi, diantaranya:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi serta penataan jabatan secara nasional;
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE yang terintegrasi;
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem terintegrasi, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi sistem perencanaan dan penganggaran;
4. Transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan ekosistem inovasi dan penguatan pelayanan terpadu.

Target awal IKP I Reformasi Birokrasi Tahun 2022 senilai 79.5 diperoleh dari Renstra 2020-2024 dengan berdasarkan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat renstra 2020-2024. Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2021.

Capaian nilai evaluasi RB Kementerian Perhubungan tahun 2023 pada triwulan II merupakan hasil penilaian mandiri atas pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LKE PMPRB) Kementerian Perhubungan Tahun 2023 yang disampaikan kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada awal triwulan II Tahun 2023.

Nilai pengungkit memiliki besaran 60% dari total nilai capaian RB, dimana nilai tersebut didapat dari beberapa aspek, yang terdiri atas Pemenuhan (20%) yang berisi penilaian dari tim evaluator RB atas pemenuhan 8 area perubahan leading sektor dan sub sektor, lalu Hasil Antara (10%) yang berisi penilaian dari masing-masing instansi pembina atas perubahan yang telah dicapai dan merupakan indikator hasil jangka panjang, dan Reform (30%) yang berisi penilaian dari tim evaluator RB atas perubahan-perubahan nyata terhadap pemenuhan 8 area perubahan yang telah dicapai.

Nilai Hasil memiliki besaran 40% dari total nilai capaian RB, dimana hasil tersebut didapat berdasarkan penilaian dari instansi pembina atas capaian beberapa aspek yang dikoordinasi oleh Sekretariat Jenderal, diantaranya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%), Kualitas Pelayanan Publik (10%), Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN (10%), serta Kinerja Organisasi (10%)

Sehingga:

$$\text{Capaian Nilai RB tahun 2023} = 52 + 36 = 88$$

Berdasarkan capaian nilai reformasi birokrasi tingkat Kementerian Perhubungan Tahun 2022 sebesar 88, menjadi nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi. Dimana nilai tersebut termasuk dalam kategori 'A' dengan predikat 'Sangat Baik', dengan interpretasi Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja. Setelah diperoleh nilai akhir (Indeks Reformasi Birokrasi), menetapkan rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 (hingga Triwulan I) terhadap target Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = (88 / 88) \times 100\% = 100\%$$

Dimana angka 79,5 didapat dari capaian target rencana strategis 2020-2024, sedangkan angka 85,27 didapat dari realisasi tercapai dari pemenuhan LKE PMPRB tingkat kementerian yang disampaikan kepada tim evaluator KemenPANRB, yang didapat berdasarkan nilai pengungkit dan nilai hasil RB Kementerian Perhubungan.

Ketercapaian hasil tercapai 107% dari nilai yang ditargetkan, hal ini didukung adanya perbaikan dari hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun sebelumnya. Selisih nilai tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kembali untuk mempertahankan capaian serta tercapainya target pada tahun berikutnya.

Faktor-faktor keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Penerapan reformasi birokrasi pada tingkat Eselon I sudah berjalan sesuai arahan Leading Sektor hingga melibatkan unit kerja UPT, dibuktikan dengan tersusunnya SK Tim hingga kehadiran pada setiap sosialisasi dan internalisasi reformasi birokrasi;
- Tersusunnya roadmap reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat 2020-2024 sebagai acuan dan masukan terhadap roadmap reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan;
- Keterlibatan seluruh unit kerja dalam menetapkan Agen Perubahan, dimana menjadi role model pada setiap unit kerja masing-masing yang berdampak mengubah pola pikir setiap pegawai hingga unit terkecilnya;

- Adanya evaluasi kelembagaan yang berdasar atas ketepatan fungsi dan ukuran organisasi, dimana dalam perkembangannya mengubah tingkat penataan UPT BPTD dan berencana menciptakan Badan Layanan Umum UPT Pengelola Terminal;
- Adanya antusias, pemahaman dan kontribusi setiap pemangku jabatan fungsional hasil penyetaraan dalam perencanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
- Pengembangan pegawai telah berdasarkan kompetensi sesuai rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi;
- Penegakan aturan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku (NDKEKP) pegawai telah disosialisasi dan diinternalisasi ke sebagian besar pegawai, dengan dijadikannya Kementerian Perhubungan sebagai pilot project penerapan NDKEKP oleh Komisi Aparatur Sipil Negara;
- Penguatan pengawasan telah ditegakkan dengan meminimalisir adanya pungli/ gratifikasi hingga unit terkecil Ditjen Perhubungan Darat, dibuktikan dengan sosialisasi rutin serta keikutsertaan unit kerja dalam menciptakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- Aktifnya unit pengaduan masyarakat yang terdapat pada Ditjen Perhubungan Darat, dimana setiap unit nya mempunyai pengelolaan pengaduan, baik secara terpusat melalui CC 151 ataupun melalui unit kerja masing-masing, dengan tindak lanjut yang responsif;
- Adanya kemauan dan kemampuan Ditjen Perhubungan Darat dalam meningkatkan pelayanan publik untuk menciptakan budaya pelayanan prima pada setiap pelayanannya, dimana telah tersusunnya Standar Pelayanan pada setiap unit kerjanya, serta adanya tindak lanjut atas masukan dalam survei kepuasan masyarakat;

Faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Penerapan reformasi birokrasi pada tingkat Eselon I sudah berjalan sesuai arahan Leading Sektor, namun belum terinternalisasi secara menyeluruh hingga ke tingkat unit kerja dibawahnya;
- Agen perubahan yang dibentuk di tingkat unit kerja belum berjalan optimal seperti pengembangan kapasitas untuk agen perubahan, belum adanya media komunikasi aktif antar agen perubahan serta belum dilakukannya evaluasi atas kinerja agen perubahan dalam meningkatkan budaya kerja dan perubahan mindset;
- Monitoring dan evaluasi rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi di level unit kerja belum seluruhnya dilakukan;
- Seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron teridentifikasi dan dipetakan dengan baik namun hasil identifikasi dan analisis tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga belum dapat dipastikan kebijakan yang dibuat oleh Ditjen Perhubungan Darat harmonis dengan kebijakan lain;
- Belum optimalnya sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan belum terdapat evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan tentang transportasi;
- Belum optimalnya evaluasi terhadap kesesuaian organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan dan mandat kepada unit kerja;
- Penerapan E-Government di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat belum sepenuhnya optimal dan beberapa aplikasi manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/stakeholder yang belum terintegrasi;

Adapun anggaran terkait Indeks RB Kementerian Perhubungan tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 156.765.000,-** dengan realisasi anggaran samapai dengan TW IV adalah sebesar **Rp. 149.265.000,-** atau **95,22%**

Kegiatan - kegiatan real yang telah dilakukan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan dalam keberhasilan IKP Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 adalah kegiatan penyusunan dokumen SAKIP dan SPIP.

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat dengan melakukan penguatan dan penajaman program-program reformasi birokrasi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat, agar fokus pada upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas;
- Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis dengan meningkatkan kapasitas, menyediakan media komunikasi aktif antar agen perubahan serta melakukan evaluasi atas kinerja agen perubahan dalam rangka meningkatkan budaya kerja dan perubahan mindset di lingkungan K Ditjen Perhubungan Darat;
- Melakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi peraturan yang tidak sinkron/harmonis dengan kebijakan lain dan memiliki potensi memperlambat proses pelayanan publik. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyederhanaan atau deregulasi kebijakan;
- Mengoptimalkan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dan melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang moda transportasi darat;
- Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan dan mandat khususnya di level unit kerja;
- Meningkatkan penerapan SPBE di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dengan menyusun Grand Design pengembangan SPBE serta pengintegrasian sistem aplikasi baik dalam manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/stakeholder;
- Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HC DP secara menyeluruh dan memetakan talenta/talent pool sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan dan menyusun peta kompetensi sebagai dasar penetapan rotasi/mutasi individu;
- Menyempurnakan ukuran kinerja individu sehingga lebih berorientasi hasil sesuai dengan levelnya serta melakukan penyempurnaan penjenjangan kinerja dan ditindaklanjuti dengan optimalisasi pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu dan dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi/ penghargaan ataupun punishment bagi pegawai;

- Memperkuat kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System dan kebijakan benturan kepentingan. Serta memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja, sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan pengendalian internal;
- Mengoptimalkan peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting yang bukan hanya berperan terhadap hal yang terkait dengan keuangan tetapi juga terhadap hal yang terkait dengan kinerja;
- Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat unit pelayanan publik dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan menginformasikan hasil survey eksternal kepada stakeholder serta menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.



Realisasi Anggaran

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TW II TAHUN 2023
DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN



Alokasi Anggaran Tahun 2023

Pagu Awal DIPA TA. 2022 sebesar **Rp91.902.162.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2023

RM	Rp	69.722.162.000	75,87%
PNBP	Rp	22.180.000.000	24,13%
Total	Rp	91.902.162.000	100,00%

Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2023

Belanja Barang	Rp	82.580.162.000	89,86%
Belanja Modal	Rp	9.322.000.000	10,14%
Total	Rp	91.902.162.000	100,00%

Pagu pada DIPA Ditjen Hubdat TA. 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar **Rp89.002.162.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

RM	Rp	66.822.162.000	75,08%
PNBP	Rp	22.180.000.000	24,92%
Total	Rp	89.002.162.000	100,00%

Belanja Barang	Rp	80.480.162.000	90,42%
Belanja Modal	Rp	8.522.000.000	9,58%
Total	Rp	89.002.162.000	100,00%

Revisi dan Refocusing Anggaran Tahun 2023

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, Direktorat Sarana Transportasi Jalan melakukan 9 kali revisi anggaran. Hal ini dilakukan karena adanya beberapa penghematan. Adapun revisi anggaran yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Rincian Revisi Per Sumber Dana s.d Triwulan II TA. 2023

	SUMBER DANA		JUMLAH
	RM	PNBP	
PAGU AWAL	69.722.162.000	22.180.000.000	91.902.162.000
REVISI KE-I	69.722.162.000	22.180.000.000	91.902.162.000
REVISI KE-II	69.722.162.000	22.180.000.000	91.902.162.000
REVISI KE-III	69.722.162.000	22.180.000.000	91.902.162.000
REVISI KE-IV	66.822.162.000	22.180.000.000	89.002.162.000
REVISI KE-V	66.822.162.000	22.180.000.000	89.002.162.000
REVISI KE-VI	66.822.162.000	22.180.000.000	89.002.162.000
REVISI KE-VII	66.822.162.000	22.180.000.000	89.002.162.000
REVISI KE-VIII	66.822.162.000	22.180.000.000	89.002.162.000
REVISI KE-IX	66.822.162.000	22.180.000.000	89.002.162.000

Rincian Revisi per Jenis Belanja s.d. Triwulan II TA. 2023

	JENIS BELANJA		JUMLAH
	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	84.080.162.000	7.822.000.000	91.902.162.000
REVISI KE-I	82.580.162.000	9.322.000.000	91.902.162.000
REVISI KE-II	82.580.162.000	9.322.000.000	91.902.162.000
REVISI KE-III	82.580.162.000	9.322.000.000	91.902.162.000
REVISI KE-IV	80.480.162.000	8.522.000.000	89.002.162.000
REVISI KE-V	80.480.162.000	8.522.000.000	89.002.162.000
REVISI KE-VI	80.480.162.000	8.522.000.000	89.002.162.000
REVISI KE-VII	80.480.162.000	8.522.000.000	89.002.162.000
REVISI KE-VIII	80.480.162.000	8.522.000.000	89.002.162.000
REVISI KE-IX	80.480.162.000	8.522.000.000	89.002.162.000

Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja s.d. Triwulan II TA. 2023

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I
BELANJA BARANG	82.580.162.000	(2.100.000.000)	80.480.162.000
• RM	60.400.162.000	(2.100.000.000)	58.300.162.000
• PNB	22.180.000.000	-	22.180.000.000
BELANJA MODAL	9.322.000.000	(800.000.000)	8.522.000.000
• RM	9.322.000.000	(800.000.000)	8.522.000.000
• PNB			
TOTAL	91.902.162.000	(2.900.000.000)	89.002.162.000

Realisasi Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2023

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2023

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU TRIWULAN I	TRIWULAN I	
				REALISASI	%
352596	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	91.902.162.000	91.902.162.000	8.929.782.021	9,72%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	70.137.204.000	70.137.204.000	5.960.173.179	8,50%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,00%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	66.137.204.000	66.137.204.000	5.960.173.179	9,01%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	21.764.958.000	21.764.958.000	2.969.608.842	13,64%
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	522.000.000	522.000.000	100.000.000	19,16%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	15.992.958.000	15.992.958.000	2.869.608.842	17,94%
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	5.250.000.000	5.250.000.000	-	0,00%

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TRIWULAN I)	REALISASI (TRIWULAN I)	
		Rp	Rp	%
1.	Belanja Barang	82.580.162.000	8.330.770.421	10,09%
2.	Belanja Modal	9.322.000.000	599.011.600	6,43%
Total		91.902.162.000	8.929.782.021	9,72%

Analisis Dana yang Belum Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang belum terserap oleh unit kerja per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU AKHIR	REALISASI (TRIWULAN I)	Sisa Pagu
		Rp	Rp	
1.	Belanja Barang	82.580.162.000	8.330.770.421	74.249.391.579
2.	Belanja Modal	9.322.000.000	599.011.600	8.722.988.400
Total		91.902.162.000	8.929.782.021	82.972.379.979

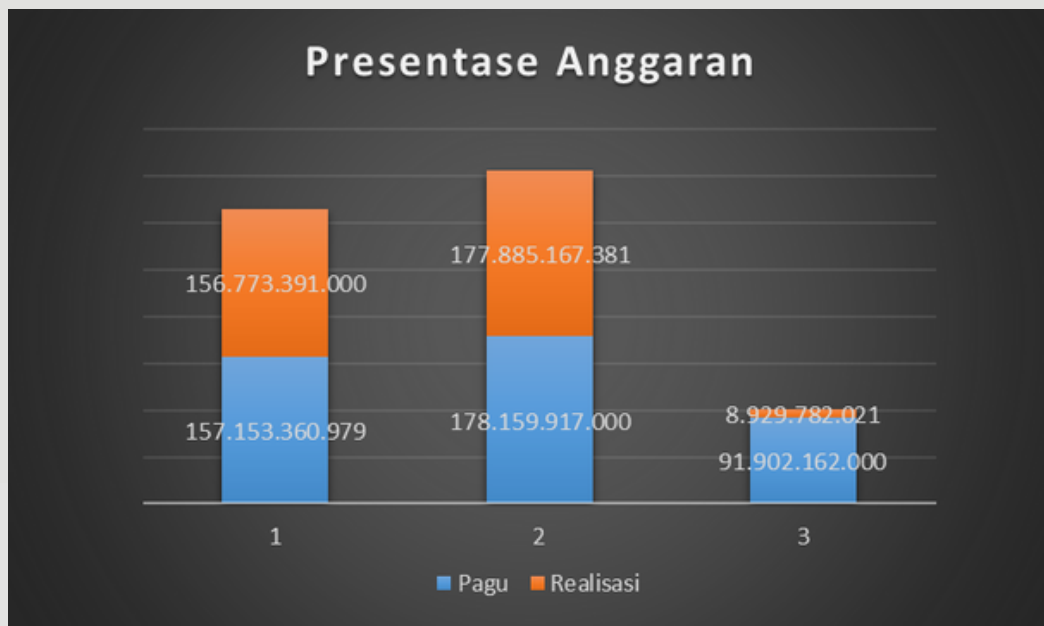
Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI (TRIWULAN I)	Sisa Pagu
		Rp	Rp	
1.	Rupiah Murni	69.722.162.000	8.929.782.021	60.792.379.979
2.	PNBP	22.180.000.000	-	22.180.000.000
Total		91.902.162.000	8.929.782.021	82.972.379.979

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 - 2023

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2021 – 2023 Triwulan II untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2021	156.983.376.000	157.153.360.979	156.773.391.000	99,76%
2	2022	145.393.007.000	178.159.917.000	177.885.167.381	99,85%
3	2023	91.902.162.000	91.902.162.000	8.929.782.021	9,72%

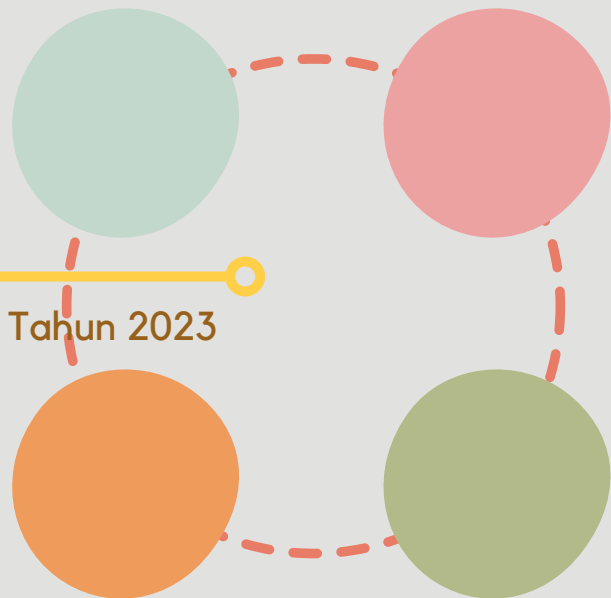


Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan realisasi setiap tahunnya, pada tahun **2022** anggaran yang terserap sebesar **Rp. 177.885.167.381,-** dari pagu akhir **Rp. 178.159.917.000,-** atau mencapai **99,85%** mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 anggaran yang terserap sebesar Rp. **156.773.391.000,-** dari pagu akhir **Rp. 157.153.360.989,-** atau mencapai **99,76%** mengalami peningkatan dan tahun sebelumnya. Pada Tahun **2023 Triwulan I** anggaran yang terserap sebesar **Rp. 8.929.782.021,-** dari pagu akhir **Rp. 91.902.162.000,-** atau mencapai **9,72%**.



Bab III Penutup

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023
Direktorat Sarana Transportasi Jalan



RINGKASAN CAPAIAN

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Sarana Transportasi Jalan serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2023 ini terdapat 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Direktorat Sarana Transportasi. Adapun rincian capaian untuk setiap Indikator pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan (AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan) per 10.000 keberangkatan terealisasi sebesar **0,0 (target 0,015)**
- Jumlah perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) terealisasi sebesar **108 perusahaan (target 100 perusahaan)**
- Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan di jalan nasional terealisasi sebesar **303 lokasi (target 313 lokasi)**
- Jumlah ketersediaan taman edukatif terealisasi sebesar **0 lokasi (target 0 lokasi)**
- Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar **21.578 orang (target 20.000 orang)**
- Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE) terealisasi sebesar **0 unit (target 0 unit)**
- Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar **67,96 % (target 66%)**
- Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan terealisasi sebesar **0 Dokumen (target 10 Dokumen)**
- Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan terealisasi sebesar **0 draf (target 8 draf)**
- Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar **0 sertifikat (target 124 sertifikat)**

- Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan terealisasi sebesar **906 orang (target 1.287 orang)**
- Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar **88 Nilai (target 88 nilai)**
- Indeks RB Kementerian Perhubungan terealisasi sebesar **87 (target 87)**
- Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun selanjutnya, Direktorat Sarana Transportasi Jalan akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Direktorat Sarana Transportasi Jalan
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan transportasi jalan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident.



Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TW II 2023			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PIC
					Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan (AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan) per 10.000 keberangkatan	Persen	0,015	0,015	0,000	200,00%	Tercapai	- Akan disempurnakan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan keselamatan angkutan umum; - akan diatur regulasi terkait dengan penyediaan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan umum; - akan diberikan reward kepada perusahaan angkutan umum yang sudah menerapkan SMK dan akan mendorong kepada perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya dengan melakukan asistensi atau pendampingan dalam penerapan SMK. - Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara menyeluruh baik offline maupun online (melalui media elektronik, media sosial dll); - Menggandeng public figure untuk mengkampanyekan keselamatan jalan sehingga meningkatkan awareness masyarakat terhadap keselamatan jalan - Melakukan Pelatihan Kompetensi Inspektur dan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat; - Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap	Semua Subdit

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TW II 2023			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PIC
					Target	Realisasi	Capaian			
									Perusahaan Angkutan Umum, baik AKAP/Pariwisata maupun Angkutan Barang Khusus (B3); - Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat dan staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan; - Melaksanakan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan umum; - Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU. - Melaksanakan Ramp Check Angkutan Umum; - Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan - Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum AKAP/Pariwisata maupun Angkutan Barang (B3); - untuk mempermudah pendataan dan pengawasan penerapan SMK pada perusahaan angkutan umum akan dibangun sistem informasi SMK pada perusahaan angkutan umum (e-SMK) yang nantinya akan diintegrasikan dengan sistem informasi perijinan angkutan umum (SPIONAM) sehingga pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal; - Optimalisasi aplikasi Terminal Online Sistem (TOS) untuk pengawasan keberangkatan bus AKAP di terminal; - integrasi aplikasi rampchek dengan aplikasi TOS dan SPIONAM sehingga mempermudah	

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TW II 2023			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PIC
					Target	Realisasi	Capaian			
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	Jumlah perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)	Perusahaan	100	100	108	100,00%	Tercapai	dalam pelaksanaan inspeksi keselamatan pada kendaraan angkutan umum - Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang hal-hal yang akan dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan Kegiatan Pembinaan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU) dan Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen SMK Perusahaan Angkutan Umum kepada perusahaan angkutan umum dalam Menyusun dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum, melaksanakan monitoring pembinaan keselamatan angkutan umum - Kegiatan Pembinaan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU) bertujuan agar sumber daya manusia untuk penilai dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU) bertambah banyak sehingga penilaian dokumen SMK dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih cepat dengan sumber daya manusia yang berkompeten. - Seiring dengan bertambahnya sumber daya manusia penilai SMK Perusahaan Angkutan Umum maka Kegiatan Pembinaan Teknis penyusunan Dokumen SMK Perusahaan Angkutan Umum perlu dilaksanakan sehingga manajemen keselamatan dan pengelolaan resiko kecelakaan dalam suatu perusahaan dapat terwujud dan timbulnya kesadaran suatu perusahaan mengenai pentingnya keselamatan.	Subdit MK

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TW II 2023			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PIC
					Target	Realisasi	Capaian			
		Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan di jalan nasional	Lokasi	313	313	303	96,81%	Belum Tercapai	- Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu salah satunya dengan meningkatkan koordinasi dengan BPTD serta peran aktif BPTD untuk melakukan inventarisasi lokasi pembangunan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan serta melaksanakan bimbingan teknis terkait dengan pembangunan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan kepada BPTD. - selain kegiatan diatas Direktorat Sarana Transportasi Jalan melalui Subdit Manajemen Keselamatan akan membuat aplikasi SiEmka yang mana aplikasi tersebut digunakan untuk mempermudah pengawasan dan perencanaan pembangunan ZoSS, RASS, dan Implementasi Batas Kecepatan yang dilaksanakan oleh BPTD sehingga data yang disajikan lebih akurat dan terdigitalisasi	Subdit MK
		Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0	-	-	0	-		Subdit MK
		Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	20.000	20.000	21.578	107,8%	Tercapai	- Upaya untuk meningkatkan capaian pelaksanaan Pekan Keselamatan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2022 adalah dengan penambahan anggaran dan lokasi BPTD yang melaksanakan Pekan - Selain itu untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang diharapkan sosialisasi keselamatan tidak hanya melalui kegiatan pekan keselamatan jalan saja, namun dapat dilakukan dengan sosialisasi keselamatan melalui media sosial yang dapat menjangkau masyarakat lebih banyak.	Subdit Promittra

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TW II 2023			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PIC
					Target	Realisasi	Capaian			
		Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	0	-	-	0			Subdit Utip
		Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	66%	66%	67,96%	102,97%	Tercapai	- Perlu dilakukannya sosialisasi kepada Dinas Perhubungan di Seluruh Indonesia tentang proses dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan Akreditasi UPUBKB baik permohonan baru maupun perpanjangan. - perlu adanya alokasi anggaran akreditasi UPUBKB yang cukup memadai guna menunjang percepatan proses akreditasi UPUBKB di seluruh Indonesia. untuk saat ini Jumlah UPUBKB yang ada di Indonesia berjumlah 471 UPUBKB. dan baru 314 UPUBKB yang terakreditasi. yang artinya masih ada 157 UPUBKB yang belum terakreditasi. - dilakukannya akreditasi online untuk permohonan akreditasi perpanjangan yang bekerjasama dengan BPTD Setempat. hal ini juga menjadi salah satu upaya Direktorat Sarana Transportasi Jalan untuk mempercepat proses permohonan akreditasi perpanjangan.	Subdit Uber
		Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Dokumen	10	10	0	0,00%	Belum Tercapai	Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang perlu dipercepat proses pengadaan jasa konsultansinya dengan harapan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kajian lebih efektif. Dan harapan ke depan Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Jalan Tahun 2021 untuk dapat dijadikan pedoman teknis dalam	Semua Subdit

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TW II 2023			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PIC
					Target	Realisasi	Capaian			
									peningkatan keselamatan Bidang Sarana Transportasi Jalan yang lebih baik.	
		Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Draf	8	8	0	100%	Belum Tercapai	Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang perlu dilaksanakan pembahasan terkait dengan draf peraturan - peraturan lebih efektif dengan menggunakan anggaran yang ada	
		Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor	Sertifikat	124	124	0	0,00%	Belum Tercapai	- Perlu adanya peningkatan jumlah alokasi anggaran baik untuk kegiatan peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor maupun kegiatan uji kompetensi penguji kendaraan bermotor demi memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi kepada seluruh penguji di Indonesia untuk meningkatkan kompetensi yang mereka miliki. - Melakukan sosialisasi kepada Dinas Perhubungan di Seluruh Indonesia tentang pentingnya meningkatkan SDM Penguji Kendaraan Bermotor demi peningkatan kualitas pelayanan bidang pengujian kendaraan bermotor - Meningkatkan kerjasama yang sudah terjalin dengan Badan Pengembangan SDM Perhubungan baik dalam hal kurikulum/materi diklat maupun proses pelaksanaan uji kompetensinya.	Subdit Uber
		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1.287	1.287	906	70%	Belum Tercapai	Meningkatkan pelaksanaan Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan dengan melaksanakan baik secara fisik maupun secara virtual	Semua Subdit

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TW II 2023			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PIC
					Target	Realisasi	Capaian			
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	88	88	88	100%	Tercapai	- Membuat timeline penyusunan dokumen SAKIP, input aplikasi e-planning dan pelaksanaan penyerapan anggaran; - Memberikan apresiasi atau penghargaan kepada pegawai yang memiliki kinerja baik dan teguran atau sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi kinerjanya; - Berkoordinasi secara rutin dengan instansi dan unit kerja terkait penyusunan dokumen SAKIP, e-Planning dan pengelolaan anggaran. - Melakukan kajian terhadap isu perkembangan atau permasalahan transportasi umum yang akan dijadikan kebijakan. - Melakukan analisis dan evaluasi atas peraturan yang sudah terbit terhadap relevansi pada kondisi saat ini.	Semua Subdit
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	87	87	87	100%	Tercapai	- Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat dengan melakukan penguatan dan penajaman program-program reformasi birokrasi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat, agar fokus pada upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas; - Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis dengan meningkatkan kapasitas, menyediakan media komunikasi aktif antar agen perubahan serta melakukan evaluasi atas kinerja agen perubahan dalam rangka meningkatkan budaya kerja dan perubahan	

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TW II 2023			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PIC
					Target	Realisasi	Capaian			
									mindset di lingkungan K Ditjen Perhubungan Darat; - Melakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi peraturan yang tidak sinkron/harmonis dengan kebijakan lain dan memiliki potensi memperlambat proses pelayanan publik. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyederhanaan atau deregulasi kebijakan; - Mengoptimalkan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dan melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang moda transportasi darat; - Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan dan mandat khususnya di level unit kerja; - Meningkatkan penerapan SPBE di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dengan menyusun Grand Design pengembangan SPBE serta pengintegrasian sistem aplikasi baik dalam manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/stakeholder; - Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HC DP secara menyeluruh dan memetakan talenta/talent pool sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan dan menyusun peta kompetensi sebagai dasar penetapan rotasi/mutasi individu;	

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TW II 2023			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PIC
					Target	Realisasi	Capaian			
									Menyempurnakan ukuran kinerja individu sehingga lebih berorientasi hasil sesuai dengan levelnya serta melakukan penyempurnaan penjenjangan kinerja dan ditindaklanjuti dengan optimalisasi pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu dan dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi/ penghargaan ataupun punishment bagi pegawai;	

LAMPIRAN

adapun lampiran yang belum terlampir didalam laporan sebagai berikut :

- UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035
- KP.1990/AJ.503/DRJD/2019 tentang Tata Cara Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
- KP-DRJD 1913 Tahun 2021 tentang Kompetensi Penilai SMK PAU
- PM 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan
- PM 16 tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
- SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

LAMPIRAN

- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013
- Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan
- 16. PM Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor
- PM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.1954/AJ.502/DRJD/2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3291 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Dirjen Perhubungan Darat tentang Pedoman Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Secara Elektronik.
- PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

LAMPIRAN

- Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.1432/AJ.502/DRJD/2020 tentang Pendelegasian wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktur Sarana Transportasi Jalan untuk Penerbitan Sertifikat Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 234 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2020-2024.

beberapa lampiran tersebut dapat diakses melalui website :
https://bit.ly/lmckdit_saranatj



DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Laporan Monitoring Capaian Kinerja
Triwulan II Tahun 2023